

**TRANSFORMASI ORGANISASI PEMUDA PANCASILA
(PEMUDA PANCASILA SUMATERA UTARA
PADA TAHUN 1961-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**RAZMI SARTIKA JAMIL
NIM. 170801014**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TRANSFORMASI ORGANISASI PEMUDA PANCASILA
(PEMUDA PANCASILA SUMATERA UTARA PADA TAHUN
1961-2020)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Oleh :

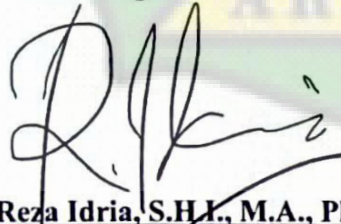
RAZMI SARTIKA JAMIL

NIM. 170801014

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk disidangkan/dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D

NIF. 198103162011011003

Pembimbing II



Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc

NIDN. 2008048903

**TRANSFORMASI ORGANISASI PEMUDA PANCSILA
(PEMUDA PANCASILA SUMATERA UTARA PADA TAHUN
1961-2020)**

SKRIPSI

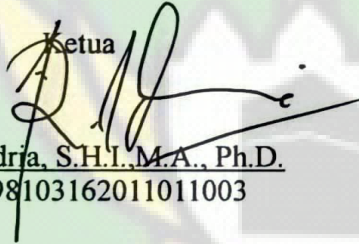
Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Yang dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 25 Juli 2023
7 Muharram 1445 H

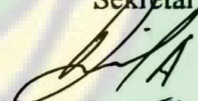
di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



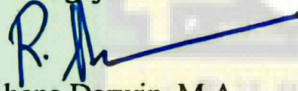
Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D.
NIP: 198103162011011003

Sekretaris



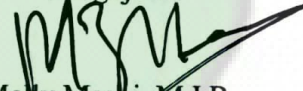
Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc
NIDN: 2008048903

Penguji I



Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP: 198812072018032001

Penguji II



Melly Mashri, M.I.R
NIP: 199305242020122016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh



Dr. Muji/Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197403271999031005

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Razmi Sartika Jamil
NIM : 170801014
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Transformasi Organisasi Pemuda Pancasila (Pemuda Pancasila Sumatera Utara Pada Tahun 1961-2020)

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam penulisan Tugas Akhir (Skripsi) Saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat mempertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Yang Menyatakan;



Razmi Sartika Jamil
Razmi Sartika Jamil
NIM: 170801014

Abstrak

Organisasi Masyarakat adalah Organisasi yang didirikan oleh individu lebih dari 2 orang secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan untuk mencapai tujuan yang kelompok atau individu di dalam kelompok tersebut. Pada tahun 1959 Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) mencetuskan terbentuknya Pemuda Patriot atau Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila menjadi Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia, mulai memberikan aspirasi politik secara independen, berpihak, independen. Pertanyaan penelitian dalam skripsi adalah Bagaimana Pemuda Pancasila bertransformasi atau mengalami perubahan signifikan sampai menjadi Organisasi Masyarakat di Sumatera Utara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian historis dan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara lapangan serta data pustaka selanjutnya analisis data pada kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa fungsi Pemuda Patriot dibentuk untuk mempertahankan Ideology Bangsa Indonesia dari paham Politik sebagai sayap IPKI. Namun, melakukan transformasi ke Organisasi Kepemudaan selanjutnya Organisasi Masyarakat hingga sekarang dan transformasi internal Pemuda Pancasila Keterlibatan politik Pemuda Pancasila di mulai pada masa Orde Baru yang berpihak kepada GOLKAR, perubahan sikap politik saat jelang Reformasi dan akhirnya mengambil sikap independen secara politik dengan tidak berpihak kepada partai politik mana pun. Dari paparan di atas Pemuda Pancasila memiliki tujuan yang jelas sebagai sayap IPKI saat itu, berubah melihat kondisi sosial masyarakat saat serta tawaran GOLKAR yang meminta PP bergabung menjadi Organisasi pendukung dan setelah Reformasi menjadi independen secara politik dengan membebaskan kader memilih partai apa saja dalam menyampaikan aspirasi politiknya.

Kata Kunci : *Organisasi Masyarakat, Pemuda Pancasila*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriringkan salam penulis panjatkan atas keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul “Transformasi Organisasi Pemuda Pancasila (Pemuda Pancasila Sumatera Utara Pada Tahun 1961-2020)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

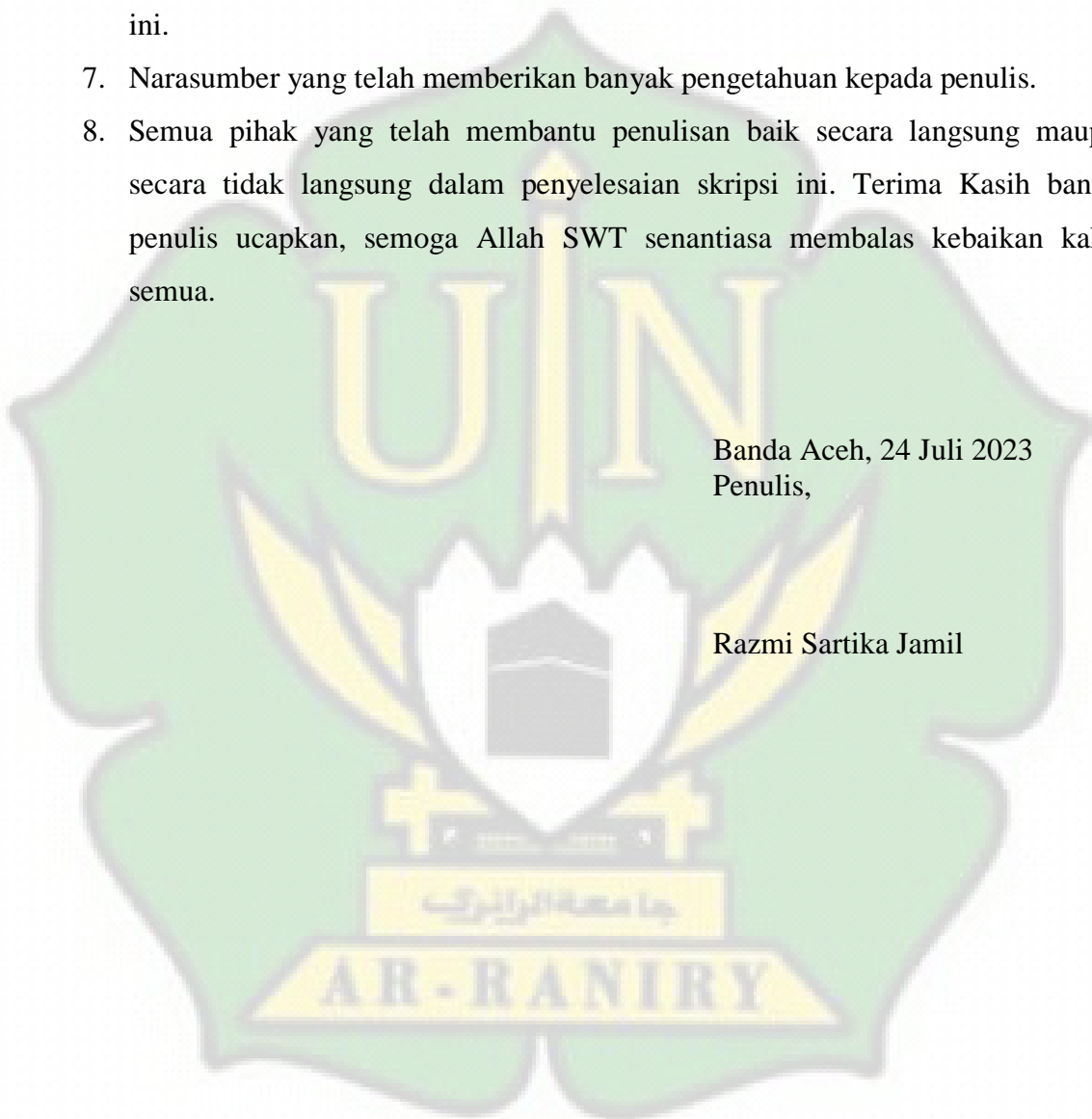
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT dan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW
2. Orang Tua tercinta yaitu Bapak Abdul Jamil dan Ibu Titik Indrawati, dan saudara kandung yang telah mendo'akan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
3. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
5. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Reza Idria, S.H.I., M.A., Ph.D selaku pembimbing I dan Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.Sc selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Serta terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri yang mampu bertahan dan tidak menyerah dalam menulis skripsi ini dan Shaumi Maghfirah, S.IP yang terus memberi semangat, serta teman-teman angkatan 2017 Program Studi Ilmu Politik. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 24 Juli 2023
Penulis,

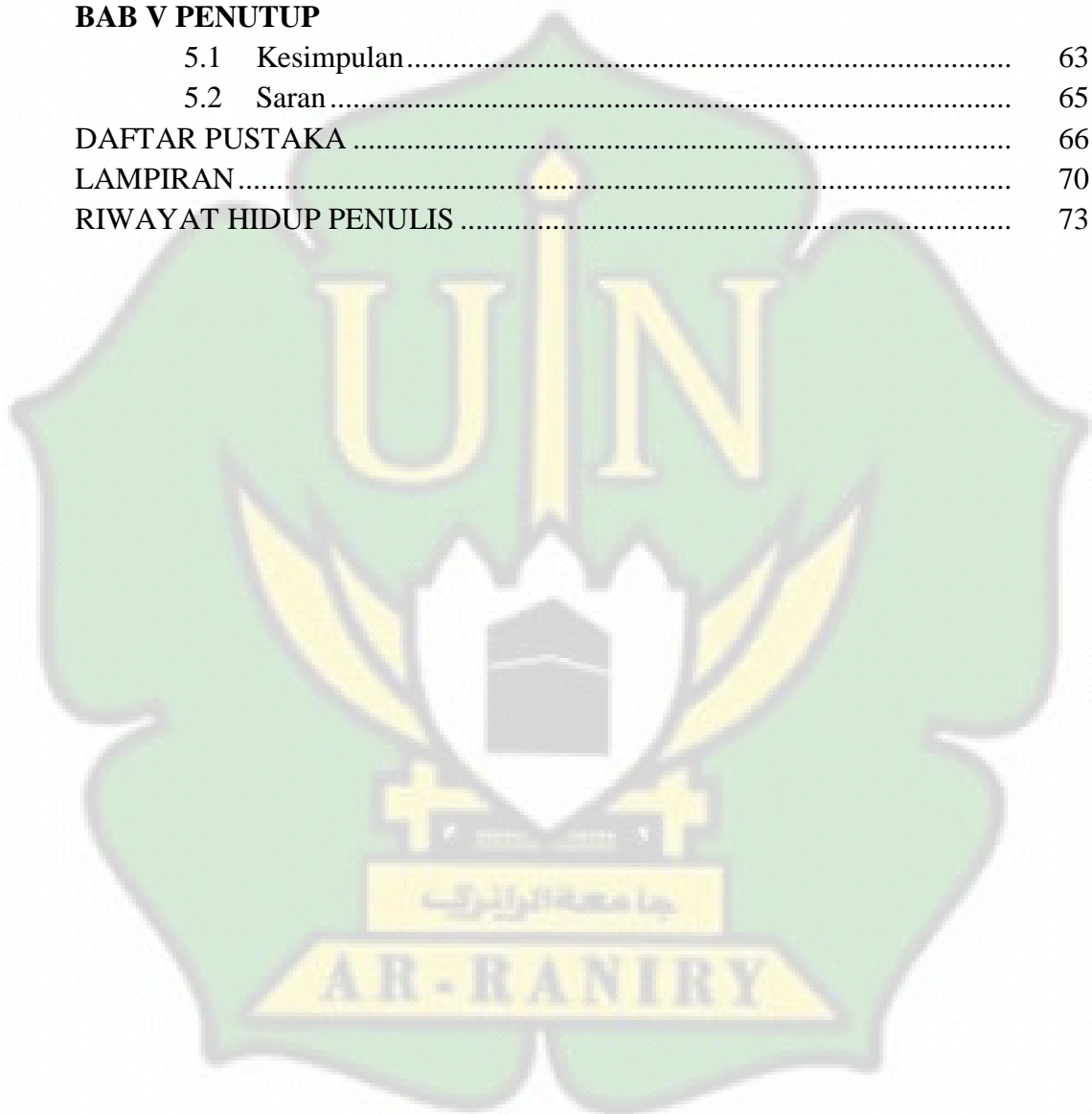
Razmi Sartika Jamil



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori	10
2.2.1 Masyarakat Sipil	10
2.2.2 Organisasi non Pemerintah	12
2.2.3 Kelompok Interests	13
2.2.4 Transformasi Organisasi	16
2.2.5 Politik Organisasi	19
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	21
3.2. Fokus Penelitian	22
3.3. Lokasi Penelitian	22
3.4. Jenis dan Sumber Data	23
3.5. Informan Penelitian	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data	23
3.7. Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Temuan Hasil Penelitian	26
4.2 Sejarah Organisasi Pemuda Pancasila	28
4.3 Transformasi Organisasi Pemuda Pancasila.....	35

4.3.1	Program dan Perencanaan.....	35
4.3.2	Perangkat Organisasi Otonom Pemuda Pancasila	46
4.3.3	Aspirasi Politik Pemuda Pancasila	49
4.3.4	Status dan Anggota Organisasi Pemuda Pancasila ..	60
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	63
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN		70
RIWAYAT HIDUP PENULIS		73



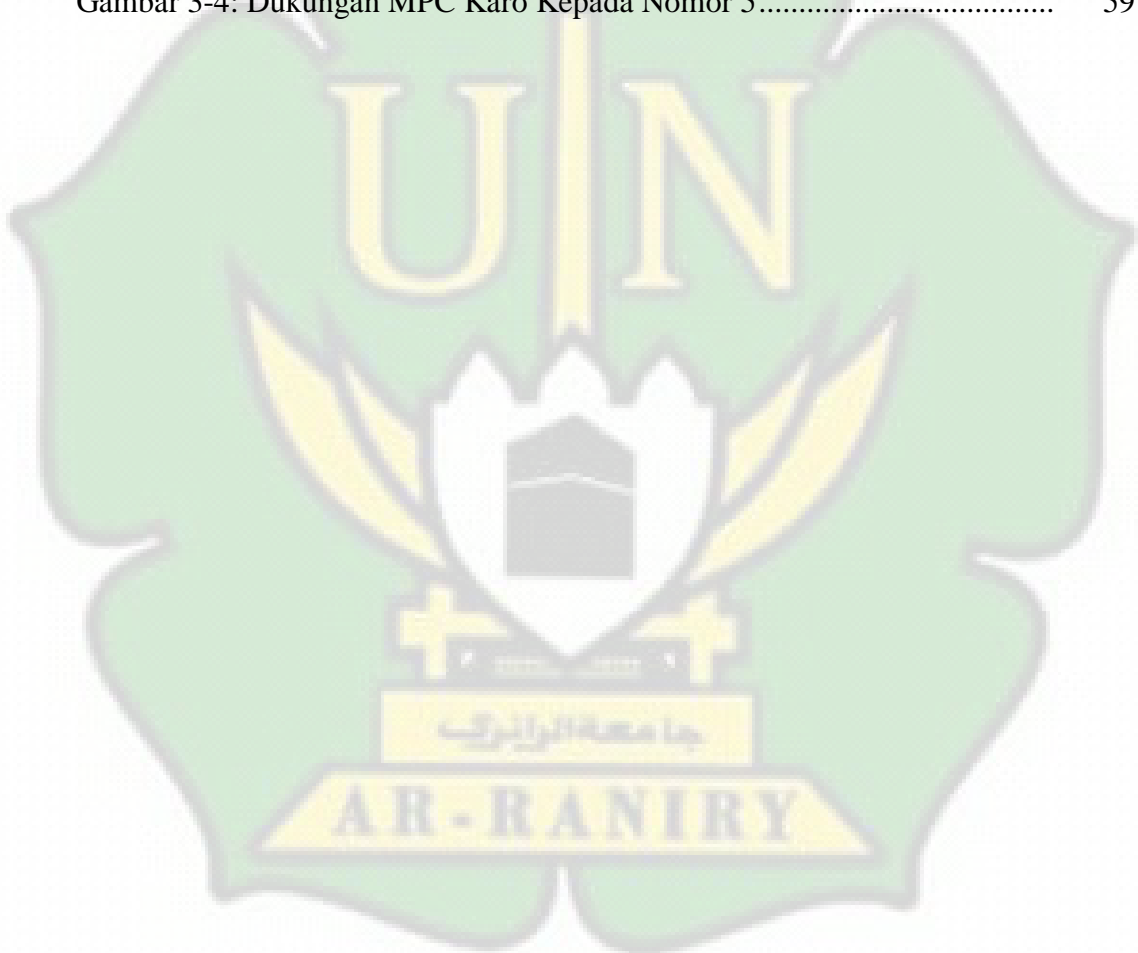
DAFTAR TABEL

Table 1-1: Informan Penelitian	23
Table 2-1: Arah Politik Pemuda Pancasila.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1: Peta Provinsi Sumatera Utara	27
Gambar 2-1: Muswil XIII PP Sumut 2017	45
Gambar 2-2: Muswil XIV PP Sumut 2022	46
Gambar 2-3: Wagub Sumut Musa Rajekshah	46
Gambar 3-1: Bupati Langkat dan Ketua MPW PP Sumut	57
Gambar 3-2: Dukungan MPW Kepada Calon Walkot Binjai	58
Gambar 3-3: Dukungan MPW Kepada Calon Walkot Medan	58
Gambar 3-4: Dukungan MPC Karo Kepada Nomor 5	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan aktivitas 2 (dua) orang atau lebih untuk mencapai tujuan dalam memenuhi kebutuhan dengan melakukan kerja sama, karena secara individu tujuan tersebut tidak dapat terpenuhi. Masyarakat beranggapan bahwa organisasi/kelompok masyarakat yang berkumpul hanya sebagai wadah atau sarana untuk mencapai tujuan. Organisasi ialah Suatu system usaha bersama antara dua orang atau lebih yang bersifat formal untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly adalah sebagai entitas yang memungkinkan masyarakat dapat menyelesaikan apa yang tidak dapat dicapai oleh individu saat bertindak sendiri.¹

Organisasi adalah perkumpulan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi dan bekerjasama relative terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan kelompok.²

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 1 menyatakan bahwa Organisasi masyarakat adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan untuk tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.³

Sekitar tahun 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan dengan sebutan “Konsepsi Presiden”, untuk menjalankannya hal pertama yang dilakukan

¹Candra Wijaya, *Prilaku Organisasi*, (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017), hlm. 2

²Wardiah Lasmi Mia, *Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), cet 1, hlm. 2

³Dewan Perwakilan Rakyat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, hlm. 2, Diakses melalui https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_2013_17.pdf pada tanggal 23 Oktober 2020

Presiden Soekarno adalah membentuk Dewan Nasional. Pada tahun 1959 beberapa petinggi militer mulai terganggu dengan wewenang yang dimiliki Partai Komunis (PKI), Pemuda Rakyat dan loyalis nya dalam Parlemen dan di masyarakat.

Pada 28 Oktober 1959 partai Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan juga dipimpin oleh Abdul Haris Nasution mendeklarasikan Pemuda Patriot atau Pemuda Pancasila di Jakarta sebagai sayap partai IPKI. Tahun 1960 ketua IPKI Sumatera Utara Kerani Bukit mencari Pemuda yang dapat dipercaya dan memiliki pengaruh atas pemuda-pemuda yang sering berkumpul di bioskop.

Cross-boys merupakan istilah sering digunakan untuk “pemuda kampung” yang memperlihatkan anak-anak muda pelajar dengan gaya dan tingkah laku yang nakal. Kebanyakan anak-anak muda berkumpul di persimpangan jalan, tidak dikontrol orang tua, pencandu rokok, suka mengganggu orang-orang yang sedang lewat, dan tidak bisa mencari uang Hal ini sering kali terjadi perkelahian antara pemuda-pemuda lainnya, biasa dipanggil dengan sebutan “Preman”.

Selain berfungsi mengamankan bioskop, kelompok-kelompok preman ini juga mengamankan kampungnya sendiri. Orang-orang kampung setempat memiliki simpati pada preman karena mereka menjaga kampung nya dan tidak ada kerusuhan. Perkelahian antar kelompok preman pada dasarnya merupakan perkelahian antar kelompok warga etnis kampung tertentu. Preman kelompok etnis dari satu kampung tertentu menyerang dan merebut bioskop yang telah dikuasai preman kelompok etnis kampung yang lain. Demikian misalnya, pada era 1960-an awal, terjadi penguasaan bioskop-bioskop Kota Medan secara etnis. Bioskop Rex atau Mega Ria dikuasai oleh preman etnis Aceh, Astana Ria dikuasai oleh preman etnis Karo, Bioskop Morning dikuasai preman etnis Minangkabau, Bioskop Olimpia dikuasai preman etnis Toba, Bioskop Majestic dikuasai oleh preman etnis Mandailing, serta bioskop-bioskop yang lain dengan preman-preman dari etnis yang lain.

Kebanyakan anak muda mencari nafkah dari bioskop, dengan melakukan pengelolaan tiket, jual beli tiket, hal ini menyebabkan tidak ada nya kerusuhan

yang terjadi di bioskop. Pengelolaan dilakukan sebaik mungkin, orang-orang menyebutnya sebagai preman bioskop. Namun, perkumpulan ini di namai dengan Perkumpulan Kotamadya Medan (P2KM) yang diketuai M.Y.Effendi Nasution.

Ketua IPKI Sumut tertarik dengan gaya kepemimpinan M.Y Effendi yang baik dan teratur dalam mengelola pemuda-pemuda di bioskop. Tahun 1961 terbentuklah Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang dipimpin oleh M.Y Effendi di Kota Medan. Kehadiran Pemuda Pancasila di Sumatera Utara membuat organisasi pemuda di bawah Partai Komunis Indonesia merasa terancam, perekrutan yang dilakukan M.Y.Effendi adalah pemuda-pemuda yang sering berkumpul di bioskop seputar Kota Medan. Masa itu bioskop tempat para pemuda Kota Medan berkumpul dengan sebutan Perkumpulan Kotamadya Medan (P2KM), bioskop tempat para pemuda mencari uang atau nafkah dan terkadang mengambil iuran ke toko-toko sekitar Kota Medan.

Sering terjadi perselisihan antara Pemuda Rakyat dan Pemuda Pancasila, setiap ada kesempatan dua Organisasi Kepemudaan tersebut saling melontarkan makian, perkelahian, pengroyokan. Beberapa kali Pemuda Rakyat melakukan intervensi kepada Pemuda Pancasila, dengan melarang percetakan surat kabar memberitakan mengenai Pemuda Pancasila terutama orang-orang yang pro-Pancasila. Tidak sampai disitu Pemuda Rakyat juga membakar percetakan yang ingin membantu Organisasi Kepemudaan (OKP) Pemuda Pancasila. Pemuda Rakyat yang memiliki ribuan anggota dan loyalis tidak membuat gentar Pemuda Pancasila yang hanya memiliki 40 orang anggota.

Peristiwa G30-S membawa Organisasi ini lebih eksis dimata masyarakat, perkembangannya menjadikan Organisasi Kepemudaan ini terbesar di Indonesia masa itu. Hal ini membawa ketua Pimpinan Wilayah Sumatera Utara M.Y. Effendi menjadi anggota Legislatif periode 1968-1971.

Kekalahan IPKI pada pemilihan umum tahun 1971 serta fusi partai politik yang diberlakukan tahun 1973 mengharuskan bergabungnya IPKI ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Tahun 1977 Pemuda Pancasila melakukan Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) untuk memutuskan kemana

Organisasi ini berlabuh setelah IPKI bergabung ke PDI dan Pemuda Pancasila menyatakan sikap independen. Untuk pertama kali nya kepengurusan ini membuat perencanaan dan program-program yang disusun untuk dilaksanakan di dalam kepengurusan OKP Pemuda Pancasila.

Namun, Pada Musyawarah Besar (MUBES) ke III pada tahun 1981 OKP Pemuda Pancasila memutuskan untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke Golongan Karya (GOLKAR).⁴ Anggota dan loyalis OKP Pemuda Pancasila diharuskan memberikan aspirasi politiknya ke Partai Golkar dan memberikan dukungan kepada kandidat pada saat pemilihan akan dilakukan selanjutnya.

Sekitar tahun 1988 OKP Pemuda Pancasila mulai membentangkan sayapnya diberbagai lini masyarakat dengan membentuk sayap Organisasi ialah Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) di Kota Medan melalui Forum Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila. 1990 Pemuda Pancasila berbenah dalam memperbaiki struktur Organisasi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemuda Pancasila dengan menyusun program-program sistematis.

Pada tahun 1996 Pimpinan pusat Pemuda Pancasila mulai gelisah akan pemerintahan yang saat itu berjalan dan structural internal Pemuda Pancasila, berawal dari terbunuhnya seorang buruh pabrik tahun 1993. Demonstrasi terjadi di berbagai wilayah Indonesia, ini membuat lunturnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah.

Tahun 1998 runtuhnya pemerintahan presiden Soeharto (Orde Baru), tepat tanggal 30 April 1999 Pemuda Pancasila mengadakan Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB)⁵ memutuskan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) beralih ke Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Pemuda Pancasila mengambil langkah untuk menjaga jarak dari partai tertentu dalam menyampaikan aspirasinya yaitu independen.

⁴ Nina Karina, “*Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara*” (USU e-Repository 2008),. hlm. 7

⁵ *Ibid*, hlm. 10

Hasil MUBESLUB 1999 juga menyatakan agar segera membentuk Partai Politik Patriot, pada Musyawarah Besar (MUBES) VII tahun 2001 mengingatkan kembali akan amanah dari hasil MUBESLUB 1999. Awal bulan Juni 2002 di Jakarta dideklarisikan Partai Politik Patriot oleh anggota Pemuda Pancasila, penyaluran aspirasi politik dan hak-hak politik anggota Pemuda Pancasila tetap sesuai ketentuan MUBESLUB 1999.

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila memiliki beberapa perangkat Organisasi ialah: (1) Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila, (2) SRIKANDI Pemuda Pancasila, (3) Lembaga Sosial Politik Organisasi, (4) Lembaga Komando Inti Mahatidana, (5) Badan Profesi dan non Profesi, (6) Yayasan, (7) Koperasi.⁶

Tahun 2012 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila memiliki jumlah anggota lebih kurang lebih 3.000.000 (tiga juta) anggota Pemuda Pancasila.⁷ Jumlah ini terus bertambah hingga lebih kurang 9.000.000 (sembilan juta) anggota. Hal ini membawa Pemuda Pancasila mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) Nomor 9267/R.MURIX/2019.⁸ sebagai Organisasi Kemasyarakatan Indonesia terbanyak di Indonesia.

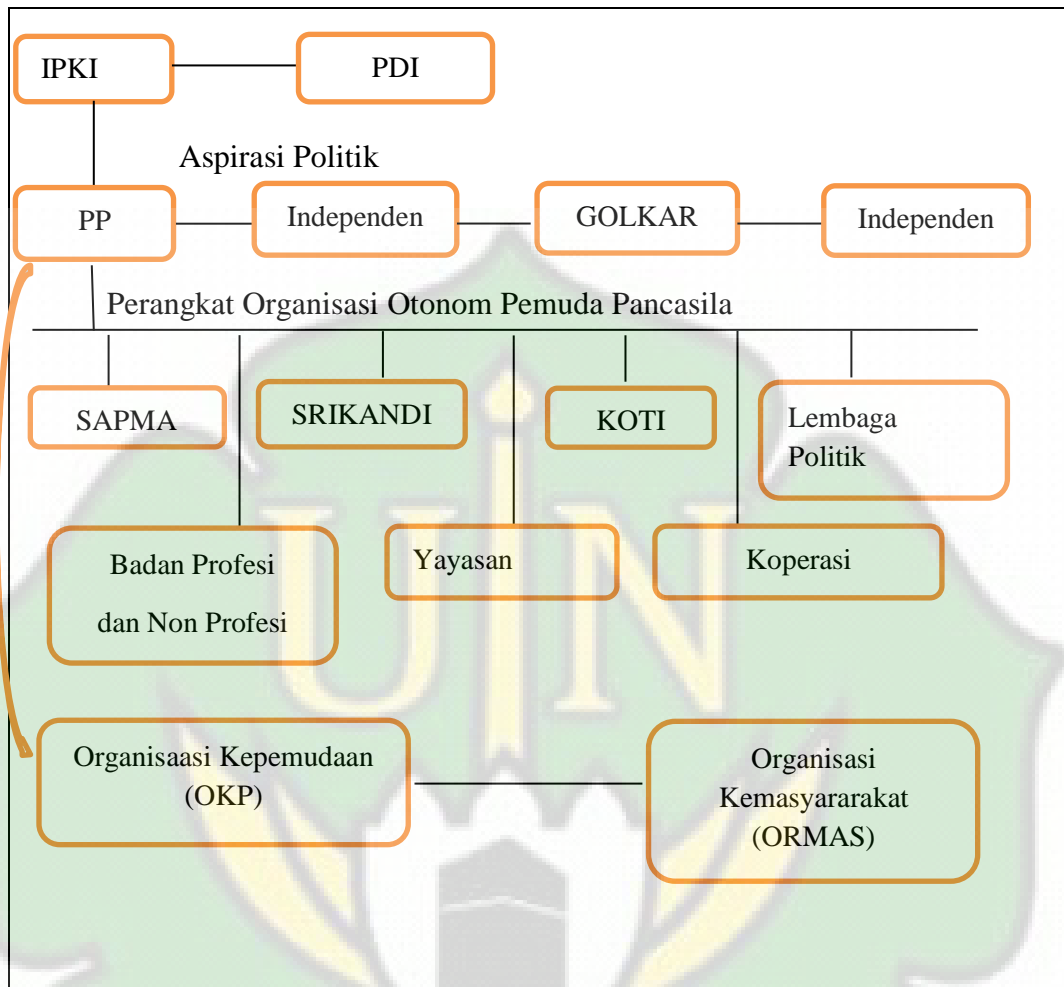
MUBES X tahun 2019 Pemuda Pancasila menegaskan akan tetap bersikap Independen secara politik pada pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau Pemilihan Legislatif sesuai hasil keputusan MUBESLUB tahun 1999. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk mendukung atau mencalonkan diri ke partai politik mana pun tanpa ada intervensi politik dari Organisasi.

Pada gambar di bawah ini transformasi atau perubahan organisasi Pemuda Pancasila secara internal dan sikap Politik Pemuda Pancasila dalam menyalurkan aspirasi politiknya:

⁶ Tercantum dalam Keputusan Musyawarah Besar X tahun 2019-2024 AD/ART Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Pancasila BAB XIII tentang Perangkat Organisasi Pasal 39

⁷ Dalam Film Dokumenter Pemuda Pancasila berjudul *JAGAL*

⁸ MPR, *Ormas Pemuda Pancasila Pecahkan Dua Rekor Muri Dunia*. Diakses melalui <https://www.mpr.go.id/berita/ormas-pemuda-pancasila-pecahkan-dua-rekor-muri-dunia> pada tanggal 26 Juli 2023 pukul 02:14



Transformasi yang dilakukan Organisasi Pemuda Pancasila dari pertama dibentuk hingga saat ini mengalami peningkatan signifikan, konsistensi kepengurusan dalam menjaga dan mengelola Organisasi menjadikannya Organisasi terbesar ke tiga Indonesia setelah Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dan menjadi ORMAS (umum) yang memiliki anggota terbanyak di Indonesia. Pemuda Pancasila memiliki terlibatan yang luas dalam perubahan perpolitikan di Indonesia terutama di wilayah Sumatera Utara. Transformasi Organisasi merupakan perubahan konsep nilai dalam menyusun strategi untuk menghadapi perubahan dan tantangan dari lingkungannya.

Dari penjabaran latar belakang diatas maka dapat dikaji lebih lanjut Transformasi Organisasi Pemuda Pancasila (**Pemuda Pancasila Sumatera Utara pada Tahun 1961-2020**)

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah: Bagaimana proses Transformasi yang terjadi pada Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila di Sumatera Utara sejak tahun 1961-2020?

1.3 Tujuan penelitian

Untuk mengetahui proses Transformasi yang terjadi pada Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila di Sumatera Utara sejak tahun 1961-2020.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan agar mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini merupakan kajian Ilmu politik yang dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai Transformasi yang terjadi pada Organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara sejak tahun 1961-2020.

2. Secara akademi

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bukan hanya bagi peneliti tapi juga akademisi lainnya mengenai kajian Transformasi Organisasi Pemuda Pancasila Di Sumatera Utara. Serta dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa/I Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

3. Bagi peneliti lain dan masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memahami bentuk Transformasi Organisasi Pemuda Pancasila (Pemuda Pancasila pada tahun 1961 sampai 2020)



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian pertama dilakukan oleh Syahrul Indra, Tengku Abdullah, Zainal Abadin (2017) mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah Volume 2, Nomor 3, Juli 2017, hal. 93-104. Dengan judul “Perkembangan Organisasi Pemuda Pancasila di Banda Aceh Tahun 1984-2016” lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Organisasi Pemuda Pancasila Cabang Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang berdirinya, menjelaskan perkembangan, dan mendeskripsikan pengaruh Organisasi Pemuda Pancasila di Kota Banda Aceh tahun 1984-2016. Objek penelitian dilakukan kepada mantan ketua, sesepuh di organisasi, dan para anggota yang termasuk dalam kepengurusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode sejarah.

Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan Pemuda Pancasila sejak berdirinya di Banda Aceh, perkembangan PP dari masa ke masa, dan pengaruh pemuda pancasila dari berbagai bidang politik, sosial, dan pendidikan. Pada masa konflik GAM dengan Negara, Pemuda Pancasila memiliki berperan penting menjalin komunikasi dengan masyarakat kota Banda Aceh dengan melakukan diskusi-diskusi nasionalisme.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nina Karina (2008) mahasiswi Program Pembangunan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul tesis “Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara” lokasi penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara khususnya wilayah yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini memberikan pemahaman kepada khalayak baik itu masyarakat umum atau pelajar secara ilmiah dinamika sosial politik Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Penelitian ini

melihat segala aspek problematika sosial politik masyarakat dari berbagai bidang sosial, budaya, politik dan agama dengan menyelesaikan problem masyarakat melalui peran PP sesuai AD/RT Pemuda Pancasila dari berdirinya Pemuda Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional.

Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai objek kajian adalah Organisasi Pemuda Pancasila wilayah di sebuah Provinsi dan sama-sama meneliti perkembangan Organisasi Pemuda Pancasila.

Namun perbedaannya adalah penelitian pertama dilakukan untuk mengetahui perkembangan keterlibatan Organisasi Pemuda Pancasila di Kota Banda Aceh dari segala aspek sosial, pendidikan. Kedua untuk mengetahui dinamika sosial politik dan penyelesaian problematika masyarakat melalui peranan dan fungsi Pemuda Pancasila merujuk AD/RT PP yang berlaku.. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada proses Transformasi Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila di Sumatera Utara sejak tahun 1961-2020.

2.2 `Landasan Teori

2.2.1 Masyarakat Sipil

Civil Society atau masyarakat sipil adalah masyarakat yang mandiri dan bebas dari intervensi negara. Masyarakat independen dan hidup dengan pola kewasdayaan, kelompok sosial yang memiliki kesadaran sebagai manusia merdeka, berdaulat dihadapan kekuasaan negara dan kekuasaan yang intimidatif. Konsep masyarakat sipil berada diluar arena keluarga, pasar, dan negara, dimana orang-orang berkelompok menyatukan kepentingan bersama.⁹

Menurut Mustari Pide, masyarakat sipil sebagai gerakan bersama-sama memperjuangkan kepentingan daerahnya, bukan hanya civil society nya saja.

⁹Ronny Melelak, *Apa dan Bagaimana Indeks Masyarakat Sipil*, (Jakarta: Yappika, 2014), hlm. 25

Mereka harus duduk bersama dan berdialog atau berdiskusi bahkan dengan perorangan (tokoh non formal) agar diperhitungkan oleh pemerintah dan kekuatan politik yang ada di daerah tersebut.¹⁰

Antonio Gramsci mendefinisikan masyarakat sipil sebagai bentuk hubungan antar Organisasi Sosial seperti partai politik, gereja, Organisasi masyarakat, sarakat dagang, masyarakat adat, dan sarakat buruh¹¹. Masyarakat sipil adalah kelompok-kelompok sosial yang lebih rendah dapat menyusun perlawanan mereka dan membangun sebuah hegemoni alternative.

Menurut John Locke masyarakat sipil merupakan bagian dari peradaban yang berada di luar kendali pemerintahan dan pasar termarginalisasi oleh keduanya. Locke berpikir pentingnya pergerakan sosial masyarakat yang mampu dilakukan kelompok sipil untuk melindungi public dari kepentingan komersial dan pemerintah¹².

Larry Diamond menegaskan ciri khas masyarakat sipil, diantaranya¹³:

1. Tujuan masyarakat sipil untuk kepentingan public
2. Masyarakat sipil tidak memiliki tujuan lain seperti merebut kekuasaan, mencari posisi penting, atau mengendalikan politik selain sebagai patner berhubungan dengan negara
3. Masyarakat sipil bersifat pluralism dan keberagaman
4. Masyarakat tidak berusaha menampilkan kepentingan pribadi atau kelompoknya

¹⁰ Wendra Yunaldi dkk, *Efektivitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kab.Lima Puluh Kota dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokrasitas*, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 79-100. hlm. 83

¹¹ Jainuri dan Salahudin, *Negara Versus Masyarakat Sipil di Aras Lokal* (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM) 2014, Cet.1.hlm. 11

¹² Andi Widjajanto dkk, *Transnasional Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS 2006), cet.1, hlm. 5

¹³ Fahdian Rahmandani dan Samsuri, *Hak dan Kewajiban Dasar nilai Intrinsik Warga Negara dalam Membentuk Masyarakat Sipil*, (*Jurnal Kajian Agama, Sosial, Budaya*) Vol.4, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 125

2.2.2 Organisasi Non-Pemerintah

Organisasi non-pemerintah adalah Organisasi yang didirikan oleh perorangan atau pun sekelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat umum.

Organisasi merupakan wadah dimana banyak orang berkumpul dan berinteraksi. Terbentuk karena adanya kesamaan misi dan visi yang ingin dicapai. Setiap individu atau unsur yang terdapat dalam organisasi tersebut secara langsung atau tidak langsung harus memegang teguh apa yang harus jadi pedoman dan prinsip di dalam organisasi tersebut.¹⁴

Organisasi menjadi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh manusia. Menurut Gibson dkk (1996:6) Organisasi merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai individu-individu secara sendiri.¹⁵

Menurut Robbins (1994:4) berpendapat bahwa Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan dengan sadar, dengan sebuah batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja terus menerus untuk mencapai tujuan suatu tujuan individu atau kelompok.¹⁶

Organisasi masyarakat menurut Chester I. Barnard merupakan sebuah sistem dari aktivitas yang koordinasi secara sadar oleh dua orang atau lebih¹⁷. Karakteristik Organisasi seperti adanya koordinasi usaha, mempunyai tujuan bersama, terdapat pembagian kerja, dan adanya hirarki kekuasaan.

2.2.3 Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem

¹⁴ Siswanto dan Sucipto Agus, *Teori dan Prilaku Organisasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) cet 1. hlm. 174

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 54

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 55

¹⁷ Candra Wijaya, *Prilaku Organisasi*, hlm. 266

politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Kelompok ini menyadari bahwa suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya mayoritas besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka lebih didengar oleh pemerintah. Tujuan kelompok ini adalah memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka.¹⁸

Sidney Tarrow dalam bukunya *Power in Movement* (1994) berpendapat bahwa: social movement adalah tantangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki tujuan bersama berbasis solidaritas, yang dilaksanakan melalui interaksi secara terus menerus dengan para elite, lawan-lawannya, dan pejabat-pejabat.¹⁹

Kelompok kepentingan ialah suatu organisasi yang berusaha untuk memengaruhi kebijakan public dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya. Sedangkan menurut, Benditt (1975) kelompok interests adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan sama yang menempatkan mereka dalam persaingan politik dengan kelompok kepentingan lainnya.²⁰

Kelompok kepentingan (kelompok penekan) muncul pertama kali pada awal abad ke-19, mereka memfokuskan diri pada satu masalah tertentu saja. Keanggotaannya terutama terdiri atas golongan-golongan yang menganggap dirinya tertindas serta terpinggirkan, seperti kaum buruh (Eropa Barat) dan golongan Afrika-Amerika (Amerika Serikat). Tujuan utama adalah memperbaiki nasib dari masing-masing golongan, terutama keadaan ekonominya.²¹

Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni²²:

¹⁸ Meriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008), hlm. 382

¹⁹ *Ibid*, hlm. 383

²⁰ Mohammad Maiwan, *Kelompok Kepentingan, Kekuasaan, Kedudukan dalam Sistem Politik*, Jurnal Ilmiah Demokrasi. Volume 15, nomor 2, April 2016, hlm. 76

²¹ Meriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 388

²² *Ibid*. hlm. 79

Pertama, kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yang rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan ke dalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustrasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar. Mereka seperti: Ikatan Warga Kampung Pulo yang tergusur; Warga penghuni Kalijodo; Persatuan pedagang rotan di Rawasari, dan sejenisnya.

Kedua, kelompok non-assosiasional, yang merupakan kelompok kepentingan yang di organisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas. Kelompok non-assosiasional berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial. Contoh kelompok ini adalah: Trah Keluarga Mangkunegaran; Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak Se-Kalimantan, Ikatan Saudagar Bugis, Alumni ITB, Alumni Pendidikan Lemhannas, Alumni Pondok Pesantren Gontor, kelompok-kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain-lain.

Ketiga, kelompok institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Contohnya ialah: Organisasi Nahdlatul Ulama (NU); Muhammadiyah; Persatuan Islam (Persis); Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan lain-lain.

Keempat, kelompok asosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok asosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya. Contohnya adalah: Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI); Persatuan Insinyur Indonesia (PII); Kamar Dagang dan Industri (KDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan lain-lain.

Dari keempat kelompok kepentingan di atas, yang paling efektif dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta kemungkinan memperoleh dukungan luas dari masyarakat adalah kelompok institusional dan asosiasional. Sementara pada derajat yang rendah, yang paling tidak efektif adalah kelompok anomik serta nonasosiasional.

2.2.4 Transformasi Organisasi

Menurut Lippitt dkk (2008) dalam *Change Management and Learning*, Perubahan Organisasi ialah serangkaian perencanaan atau kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia²³. Transformasi Organisasi merupakan perubahan konsep nilai pada Organisasi dalam menyusun strategi Organisasi menghadapi perubahan dan tantangan dari lingkungannya.

Menurut Lewin dalam Brown dan Posner (2001) bahwa proses perubahan dalam Organisasi mengikuti 3 (tiga) tahapan yakni Unfreezing, Change (Movement), dan Refreezing. Dalam proses perubahan tersebut, Organisasi harus mampu mengidentifikasi elemen-elemen yang perlu dirubah, melakukan perubahan, dan membekukan kembali proses yang baru.²⁴

²³ Imelda dkk, cet.1.hlm.16

²⁴ *Ibid.*

Proses perubahan Organisasi dikemukakan oleh Kotter (2011) melalui beberapa tahapan, yakni²⁵:

1. Membangkitkan rasa urgensi
2. Membentuk koalisi
3. Mengembangkan visi dan strategi
4. Mengkomunikasikan visi perubahan
5. Menggerakkan, mendukung, dan memberdayakan lebih baik orang untuk tidak sekedar mendukung. Melainkan bertindak atau berbuat dalam menjalankan visi tersebut.
6. Merencanakan dan mengusahakan pencapaian jangka pendek
7. Melakukan konsolidasi pencapaian yang telah dicapai dan mendorong lebih banyak lagi perubahan
8. Melembagakan pendekatan-pendekatan baru dalam kultur Organisasi.

Tahapan dalam proses perubahan menurut Kotter ini merupakan tahapan yang tidak terpisahkan atau saling berhubungan. Dalam tahapan ini, maka inisiatif perubahn adalah dari atas ke bawah (top down).

Perubahan Organisasi menurut Siswanto dan Sucipto (2008:104) ialah penambahan orang baru, memodifikasi suatu peraturan atau program lainnya. Organisasi harus melakukan perubahan dalam Organisasi untuk meningkatkan kinerja Organisasi dan meninggalkan keterpurukan-keterpurukan yang terjadi saat itu²⁶. Perubahan sering berlawanan dengan nilai-nilai yang dihormati anggota Organisasi, anggota Organisasi sering melanggar keputusan Organisasi karena menilai kondisi sosial dan lingkungan masyarakat terutama kepentingan setiap anggota Organisasi.

Perubahan dilakukan untuk mengatasi krisis yang dihadapi Organisasi, terutama krisis pada masa yang akan datang. Krisis dalam Organisasi biasanya terjadi disebabkan karena kurang adaptifnya Organsiasi menghadapi berbagai

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Candra Wijaya, *Prilaku Politik*, hlm. 245

perubahan individual jajaran Organisasi, krisis internal atau krisis eksternal Organisasi.

Perubahan Organisasi pada dasarnya untuk²⁷:

1. Meningkatkan efektivitas Organisasi
2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran Organisasi
3. Berorientasi kepada perubahan
4. Mendekatkan diri pada pelanggan atau pengguna jasa Organisasi

Kemampuan organisasi melakukan perubahan adalah agar Organisasi berfungsi dalam mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Meskipun dalam mencapai tujuan bukan hanya kepentingan Organisasi tetapi untuk kepentingan individu yang ada di dalam organisasi. Individu Organisasi adalah orang yang sangat berkepentingan tentang kinerja Organisasi. Hubungan antara Organisasi dengan orang yang ada dalam Organisasi bersifat mutual simbolik (Siahaan dan Zen, 2012:47).

Pimpinan Organisasi adalah yang bisa menyakinkan bahwa kepentingan individu akan terpenuhi oleh Organisasi, secara langsung menyakinkan anggota bahwa kepentingan tersebut akan terpenuhi secara efektif jika setiap individu memberikan kinerja yang juga tinggi terhadap Organisasi. Karena itu kinerja Organisasi ditentukan oleh kontribusi setiap anggota.

2.2.4.1 Sumber-Sumber Pendorong Perubahan

Menurut Siswanto dan Sucipto Sumber-sumber yang dapat mendorong adanya perubahan dalam organisasi antara lain:

1. Lingkungan

Perubahan organisasi seringkali dipengaruhi oleh perubahan lingkungannya. Lingkungan umum organisasi dalam masyarakat meliputi faktor-faktor teknologi ekonomi, hukum, politik dan kebudayaan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 456

2. Sasaran dan nilai

Dorongan lain untuk perubahan datang dari modifikasi sasaran organisasi, perubahan nilai sangat penting karena menyebabkan perubahan sasaran.

3. Teknik

Sistem teknik jelas merupakan suatu sumber perubahan organisasi. Perubahan teknik meliputi bentuk dan fungsi suatu produk atau jasa, disamping proses transformasi yang dipakai oleh Organisasi.

4. Struktur

Perubahan Organisasi lainnya adalah subsistem struktur Organisasi tersebut.

5. Manajerial

Kegiatan dan pengawasan manajerial adalah mempertahankan keseimbangan yang dinamis antara kebutuhan akan stabilitas dan kontinuitas organisasi dengan kebutuhan akan adaptasi dan inovasi.

6. Konsultasi

Dorongan kuat untuk perubahan organisasi juga datang dari para konsultan.

Sasaran perubahan yang direncanakan adalah untuk mempertahankan organisasi tersebut agar dapat tetap seperti sekarang ini dan dapat hidup terus. Selama organisasi menghadapi perubahan-perubahan dan jasa yang sekarang ada.

Menurut Rivai dan Mulyadi (2012:381) perubahan bisa disebabkan oleh faktor internal dan eksternal²⁸. Faktor internal perubahan individu adalah motivasi dan keinginan individu untuk berubah, sedangkan faktor eksternal perubahan adalah tuntutan keluarga atau lingkungan sekitar Organisasi. Perubahan yang diakibatkan dari eksternal Organisasi karena pengaruh ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, dan persaingan antara Organisasi.

²⁸ *Ibid*, hlm. 252

2.2.5 Politik Organisasi

Individu dalam Organisasi yang dinilai pintar dalam bermain politik sering dinamakan *Playing Games*. Taktik dalam bermain politik ditemukan oleh Gibson, Ivancevich, Donnelly, Konopaske antara lain²⁹:

1. *Insurgency Game*, taktik ini untuk menolak kewenangan. Misalnya individu diminta untuk menegur anggota organisasi yang melanggar ketentuan atau kebijakan organisasi maupun kebijakan pemerintah, biasanya dilakukan dengan setengah hati atau dilakukan dengan agresif untuk menutupi keberpihakan individu kepada Organisasi.
2. *Counter Insurgency Game*, seseorang yang memiliki kewenangan melawan balik ketika menghadapi teguran.
3. *Sponsorship Game*, merupakan permainan yang bersifat langsung. Dimana individu menempel atau lengket kepada seorang yang mempunyai kekuasaan.

Menurut Kreitner dan Kinicki (2010:455) taktik politik yang dapat dilakukan berupa:

1. Menyerang atau menyalahkan orang lain
2. Menggunakan informasi sebagai alat politik atau distorsi informasi
3. Menciptakan citra menyenangkan untuk mempengaruhi seseorang
4. Membentuk koalisi kuat atau bergabung dengan tim yang memiliki pengaruh
5. Menciptakan utang sosial.

2.2.5.1 Jenis-Jenis Politik Organisasi

Menurut Sopiah (2008:103) jenis-jenis kegiatan politik yang dilakukan Organisasi, antara lain:

²⁹ *Ibid*, hlm. 259

1. menyerang atau menutup mata terhadap pihak lain
2. seleksi dalam mendistribusikan informasi
3. mengendalikan saluran informasi
4. membentuk koalisi (untuk membangun kelompok diluar Organisasi).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yaitu sebuah penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang bersifat alamiah secara historis. Tujuan utama penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang telah mendasar, menarik dan bermakna di lapangan dan penelitian kualitatif terkadang pula disebut penelitian pemahaman.

Pendekatan Kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dan situasi tertentu menurut prestektif peneliti sendiri.³⁰

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian historis (Sejarah). Jenis historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu.

Jenis penelitian sejarah yang akan diambil melalui sejarah heuristic (pengumpulan sumber). Heuristic secara teminalogi berasal dari bahasa Yunani Heuristiken yang berarti mengumpulkan atau menentukan sumber, yang dimaksud dengan sumber sejarah merupakan jumlah sejarah melalui catatan, tradisi lisan,

³⁰*Ibid*, hlm. 26

reruntuhan, berkas-berkas prehistori. Penulisan sejarah tidak mungkin dilakukan tanpa adanya sumber sejarah (Suhartono, 2014).³¹

Penelitian sejarah memiliki sifat sistematis, maka dalam tahap metode sejarah tidak dapat ditukar balik atau mendahulukan kritik, interpretasi, atau historiografi. Semua jenis penelitian sejarah harus menempatkan sumber sejarah (Heuristik) sebagai syarat mutlak yang harus ada. Tanpa sumber sejarah maka kisah masa lalu tidak dapat direkonstruksikan oleh sejarawan atau penulis sejarah.³²

Jenis sumber sejarah (heuristic), sebagai berikut (Daliman, 2012)³³:

1. sumber sejarah yang bersifat umum dan khusus
2. sumber sejarah tertulis dan tidak tertulis
3. sumber sejarah primer dan sekunder

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sejarah terahirnya Organisasi Pemuda Pancasila, perubahan internal Pemuda Pancasila, dan sikap politik Organisasi dalam memberikan aspirasi politiknya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan di kantor Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Medan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis dan sumber data yaitu :

³¹ *Ibid*, hlm. 9

³² *Ibid*, hlm. 10

³³ *Ibid*

- Data Primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Pada penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan.
- Data Sekunder, ialah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, laporan advokasi LSM atau dihasilkan dari pihak lain. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi resmi dan juga referensi buku, jurnal, ebook, artikel, dan media massa yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3.5 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Ketua Dewan Pakat MPW Pemuda Pancasila	1
2	Anggota MPC Pemuda Pancasila Kota Medan	3

Table I; Informan Penelitian

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam menunjang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus untuk menggali informasi dari responden³⁴. Wawancara mendalam adalah wawancara secara intensif untuk mendapatkan data kualitatif yang mendalam. Pada penelitian ini

³⁴ Kriyantono Rahmad, *Teknik Praktis Riset*, (Jakarta: PT.Kencana Perdana, 2006), hlm. 63

wawancara akan di lakukan secara personal terhadap masing-masing informan dengan kesepakatan waktu yang ditentukan.

2. Dokumen dan Kepustakaan

Dokumentasi digunakan untuk melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain serta salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumentasi lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh objek yang bersangkutan. Sedangkan kepustakaan berguna sebagai penunjang penelitian untuk memperoleh data kepustakaan lebih lengkap dan mendapat referensi.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1992), analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera di perbaiki.³⁵

Menurut Miles dan Huberman ada 3 tahapan yang harus dilakukan pada saat analisis data diantaranya³⁶:

3.7.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih atau analisis data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses dapat dilakukan selama penelitian dilakukan. Reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, dan menguraikan dengan singkat.

³⁵ Husaini, Purnoma Setiady, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 83-84

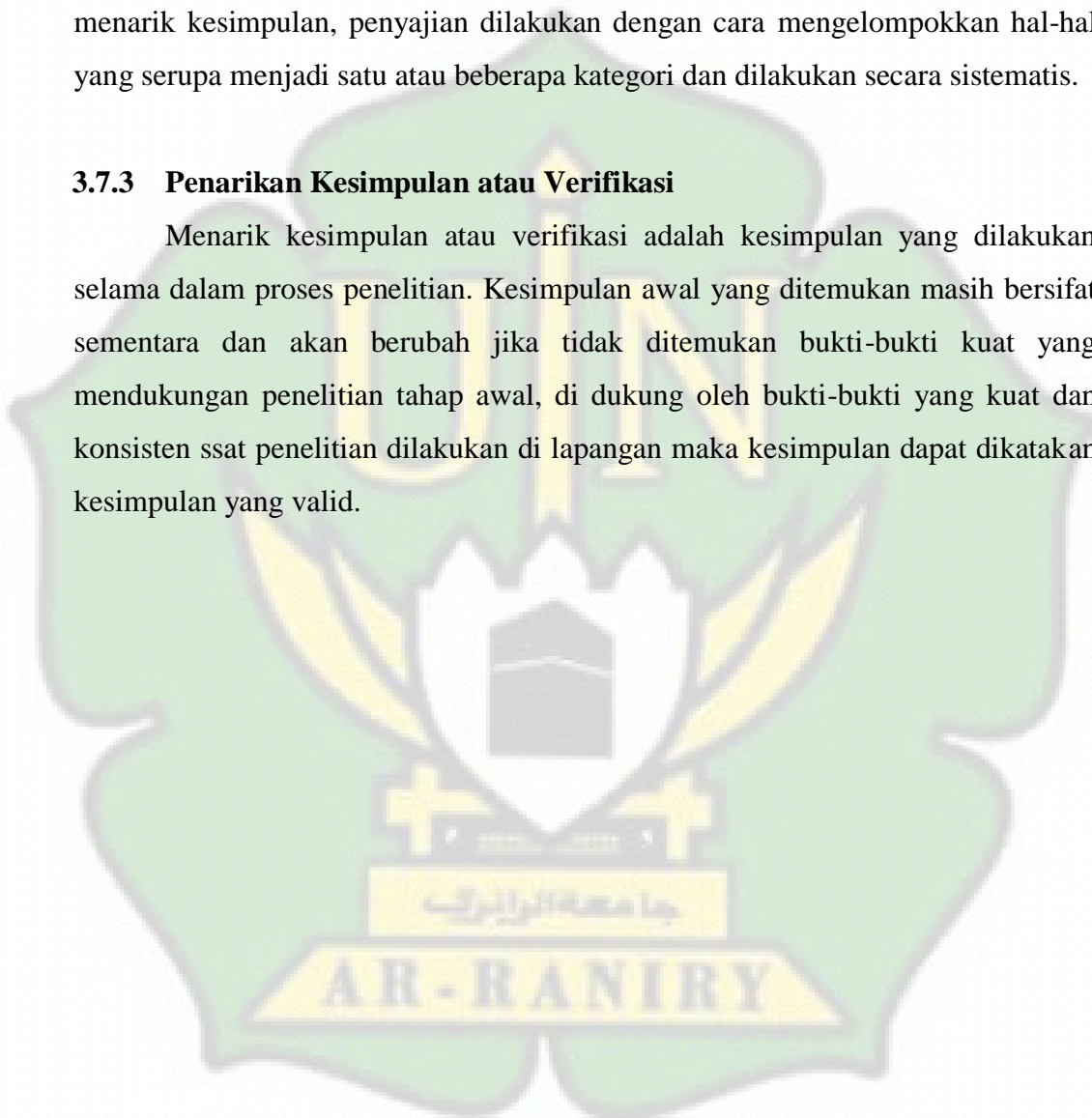
³⁶ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba, 2012), hlm. 164

3.7.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan, penyajian dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung penelitian tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten ssat penelitian dilakukan di lapangan maka kesimpulan dapat dikatakan kesimpulan yang valid.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai hasil penelitian yang memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan membahas data-data berupa hasil wawancara yang peneliti peroleh dari hasil penelitian lapangan.

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1.1 Demografi Provinsi Sumatera Utara

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara $72.981,23 \text{ km}^2$. Terletak antara 10-40 LU, 980-1000 B.T. Batas wilayah sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera.³⁷

Provinsi ini beribu kota di Kota Medan, dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, juga terbanyak di pulau Sumatera. Pada tahun 2021 penduduk Sumut berjumlah 15.136.522 jiwa, dengan kepadatan penduduk $207,40 \text{ jiwa/km}^2$.

³⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, *Tentang SUMUT*. Diakses melalui <https://dprd-sumutprov.go.id/page/tentang-sumut> pada tanggal 5 Desember 2021

PETA PROVINSI
SUMATERA UTARA



Gambar 1-1: Peta Provinsi Sumatera Utara

AR-RANIRY

4.2 Sejarah Pemuda Pancasila

Panglima Daerah Militer I Kolonel Simbolon mengumumkan darurat perang di Sumatera Utara dengan memutuskan hubungan Sumatera Utara dengan Kabinet Ali Sastroamidjoyo pada 22 Desember 1956. Pada 21 Februari tahun 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan gagasan pergantian sistem Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin sebagai solusi kondisi politik, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat saat itu yang didukung partai besar (PNI dan PKI), TNI, dan Mahkamah Agung. Mayor Jenderal A.H Nasution mengusulkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan sistem Demokrasi Terpimpin, pengusulan tersebut karena dukungan TNI terhadap konsepsi Presiden.

Langkah pertama dilakukan presiden pada 3 Maret 1957 membentuk Dewan Nasional untuk mewujudkan Konsepsi Presiden. Namun, wakil partai dalam Dewan Nasional tidak menyetujui UUD 1945 sebagai landasan sistem Demokrasi Terpimpin dan UUDS 1950 harus tetap menjadi landasan sistem.

Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) tahun 1958 di Sumatera Barat salah satu pemberontakan yang menuntut desentralisasi kebijakan ekspor. Pemberontakan PERMESTA Sulawesi Selatan disebabkan penolakan kebijakan sentralisasi ekonomi oleh pemerintah pusat³⁸. Konflik di setiap daerah di Indonesia terus meningkat, kondisi politik pusat terpecah.

Presiden mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari tentang pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin dan kembalinya pemberlakuan UUD 1945. Keputusan disampaikan di hadapan DPR 2 Maret 1959, sidang konstitusi 22 April 1959 Presiden meminta menempatkan kembali UUD 1945 tanpa perubahan. Keputusan Presiden berakhir dengan pemungutan suara hingga 3 kali, anggota konstituen gagal menetapkan konstitusi negara. Pada tanggal 3 Juni 1959 beberapa fraksi konstitusi tidak menghadiri sidang kecuali membatalkan konstitusi Demokrasi Terpimpin.

³⁸ Koentjaraningrat, 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integral Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 24

A.H Nasution sebagai Penguasa Perang Tertinggi mengeluarkan PEPERPU/040/1959 tentang larangan adanya kegiatan politik termasuk penundaan sidang dewan konstituen. Akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai berlakunya Demokrasi Terpimpin dengan landasan hukum UUD 1945.

Deliar Noer menyatakan bahwa,,

“.....Dia membubarkan konstituente dan membentuk DPR baru yang semua anggotanya di pilih olehnya, tidak ada pemilihan umum dilakukan selama itu. Dia bentuk Dewan Nasional kemuda dibubarkannya. Forum NASAKOM dia buka dimana pun dari pemerintah sampai organisasi semi pemerintah seperti Front Nasional, sehingga PKI memperoleh pijakan termasuk di tempat yang tidak ada ranting dan cabang PKI. Dia putar politik bebas aktif menjadi politik luar negeri berporos ke Peking. Dia bawa Indonesia mundur dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perekonomian merosot”.³⁹

Pada saat ini partai politik tidak memiliki kekuatan pada perpolitikan nasional, Presiden Soekarno menyusun Kabinet melalui hubungan kedekatan pada Presiden, PKI dengan mudah melebarkan sayap nya sampai ke plosok. Beberapa bulan setelah Dekrit Presiden Lahirlah salah satu organisasi masyarakat berbasis kepemudaan berasaskan Pancasila serta didasari kondisi politik pada masa itu. Salah satu Organisasi Kepemudaan tersebut ialah Organisasi Pemuda Pancasila. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) mendeklarasikan lahirnya organisasi Pemuda Pancasila pada 28 Oktober 1959 di Jakarta bertepatan peringatan Sumpah Pemuda ke-31.

Penggagasnya para petinggi militer yang masih aktif dalam kedianasan adalah A.Haris Nasution, Jenderal Sambas, dan Jenderal Ahmad Sukmawijaya. Tujuan berdirinya organisasi Pemuda Pancasila sebagai ujung tombak dalam menghadapi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pengikutnya. Pada saat itu, PKI sudah mendirikan Organisasi Pemuda Rakyat, sehingga IPKI pun mendirikan organisasi Pemuda Pancasila untuk mengontrol pergerakan PKI yang sudah mulai

³⁹ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, (Bandung: PT. Mirzan, 2000), hlm. 31

menyebarkan pengaruhnya kepada masyarakat untuk merebut kekuasaan dan mengganti ideology pancasila dengan ideology komunis.⁴⁰

Pengaruh paham Komunis sudah menyebar ke seluruh pelosok wilayah Indonesia terutama wilayah Sumatera Utara, Ketua IPKI Kerani Bukit memprakarsai Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Pada tahun 1960 dengan memulai memberikan tugas kepada seseorang yang bernama Rachmadsyah untuk bertemu M.Y.Effendi Nasution orang yang menguasai Medan Bioskop dan ketua P2KM yaitu Persatuan Pemuda Kota Medan. P2KM adalah sekelompok pemuda yang mangkal di bioskop-bioskop sekitar Medan. Tujuan pertemuan itu untuk membentuk organisasi Pemuda Pancasila di Medan, PP merupakan onderbow dari partai IPKI yang bermula bernama Pemuda Patriot.⁴¹

M.Y.Effendi lebih dikenal sebagai Pendi Keling mendapatkan tugas dari Kerani Bukit untuk membentuk Pemuda Pancasila di Kota Medan, mengajak tokoh-tokoh pemuda Kota Medan untuk terlibat langsung. Merekrut pemuda yang biasa disebut sebagai preman (Cross Boy) atau manusia bebas yang tinggal di jalanan.

Pada tahun 1961 bulan Agustus di gedung Selecta Kota Medan dengan disaksikan serta di resmikan oleh H.A.Azis yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Mayor Hamid dari Koanda Sumatera Utara, Kerani Bukit sebagai ketua IPKI Sumatera Utara melantik dan meresmikan berdirinya Organisasi Pemuda Pancasila dengan susunan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai berikut⁴² :

⁴⁰ Badan Pelaksanaan Kaderisasi Pemuda Pancasila, *Sejarah Pemuda Pancasila*, (DKI Jakarta: Rumah Kerja Pengurus Nasional BPK). Diakses Pada 30 Desember 2020 Dari Situs <http://www.bpk-pp.com/sejarah-pemuda-pancasila>

⁴¹ Nina Karina, 2008, *Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara*, USU e-Repository, hlm. 37

⁴² *Ibid*, hlm. 38

Ketua Umum : M.Y.Effendi Nasution

Ketua : Daniel Mamora

Ketua : Barik

Sekretaris Umum : Jansen Hasibuan

Sekretaris : Rosiman

Bendahara : Klengki A (seorang turunan Tinghoa)

Fungsionaris Pemuda Pancasila saat itu terdiri dari M.Y.Effendi, Rosiman, Yan Parahum Lubis, Amran Ys, Das Tagor Lubis, M.Saat Gurning, Razali, Yansen Hasibuan, Amril Ys, dan lainnya⁴³.

Perkembangan organisasi Pemuda Pancasila Sumut di bawah kepemimpinan M.Y. Efendi Nasution sangat pesat. Banyak pemuda yang masuk menjadi anggotanya. Dalam memimpin dan menakhodai PP, beliau sangat tegas sekaligus mengayomi para pemuda untuk berani bertanggung jawab. Pemuda Pancasila memiliki 3 resep yang populer yang dinamakan tiga-O yaitu: otot, omong, otak. Maksudnya bahwa organisasi PP membutuhkan anggota yang kuat dan berani mengandalkan fisik, pandai berbicara, dan memiliki pemikiran yang pandai dan cerdas. Orang kuat disegani, pandai omong, tidak mudah diperdaya dan mempunyai otak yang cerdas agar tidak bisa ditipu orang.⁴⁴

Organisasi binaan Partai Komunis Indonesia yaitu Pemuda Rakyat melihat Pemuda Pancasila yang semakin meluas dikalangan pemuda-pemuda Kota Medan menjadi sasaran ketidak sukaan dengan menyebarkan trik dan ejekan untuk mengucilkan lawannya. Mengumpulkan anggota mereka yang ribuan orang untuk menggelar demonstrasi-demonstrasi, intimidasi dan propaganda untuk menjatuhkan organisasi Pemuda Pancasila yang baru dibentuk.

⁴³ *Ibid*, hlm. 40

⁴⁴ Mengulas Sejarah Pemuda Pancasila, HMY EFENDY Nasution Ketua DPW PP Sumut Pertama”, dalam Sumut24, Medan. Diakses pada Rabu 30 Desember 2020.

Perkelahian sering terjadi antara Pemuda Pancasila dan Pemuda Rakyat di Sumatera Utara, tahun 1964 akhir seorang anggota Pemuda Pancasila Yan Paruhum Lubis atau Ukok Majestik diculik oleh Pemuda Rakyat. Pemuda Pancasila tidak tinggal diam dan membalas nya dengan menculik Ketua Pemuda Rakyat wilayah Medan Barat. Hal ini didengar anggota Pemuda Rakyat lalu mengumpulkan seluruh anggota untuk menyingkirkan Pemuda Pancasila yang pada saat itu hanya berjumlah 40 orang. Ukok Majestik yang mendengar hal ini tidak tinggal diam, dengan menggunakan kayu, batu, dan tiang bendera Ukok Majestik beserta anggota lainnya menghajar barisan Pemuda Rakyat hingga mereka melarikan diri. Saat di jumpai Ukok Mejestik di kediaman pribadinya melalui wawancara yang dilakukan Muryanto Amin menyatakan bahwa:

“.....melalui surat kabar ‘Gotong-Royong’ Pemuda Rakyat menulis semua tindakan yang dilakukan Ukok Majestik selama beberapa hari berturut-turut dengan tulisan tentang Gatot Subroto dan A.H. Nasution duduk di kursi dihadapannya ada seorang Pemuda yang sedang berlutut sambil merapatkan kedua tangan dan menundukkan kepala. Pada punggung Pemuda itu bertuliskan kalimat “YAN PARUHUM LUBIS ALIAS UCOK MAJESTIK PERAMPOK KOTA”. Selanjutnya di surat kabar itu ada gambar seorang anggota Pemuda Pancasila duduk di lantai sambil menghisap ganja dan sebotol minuman keras”.

Hal ini diberitakan pada surat kabar tersebut setiap hari sampai akhirnya Pemuda Pancasila berkumpul untuk menyerang dan membakar kantor surat kabar Gotong-Royong, beberapa orang ditangkap oleh polisi. Pada tanggal 24 Februari 1965 semua surat kabar yang pro-Pancasila dibubarkan oleh Pemuda Rakyat, surat kabar yang tersisa di bawah kendali Pemuda Rakyat seperti “Harian Harahap”, “Harian Bendera Revolusi”, “Gotong-Royong”, “Obor Revolusi”.⁴⁵

Aksi saling balas di antara Pemuda Rakyat dan Pemuda Pancasila terus berlanjut, pembubaran surat kabar pro-Pancasila menjadikan masyarakat pro-Pancasila kekurangan informasi. Dengan dukungan ABRI untuk melawan PKI dan Pemuda Rakyat surat kabar “Harian Tjahaja” milik Kerani Bukit yang sudah lama tidak beroperasi dibeli Ibrahim Sinik untuk dilanjutkan penerbitan surat kabarnya.

⁴⁵ Muryanto Amin, *Politik Layar Terkembang*, (Medan: Vote Institute, 2013) cet.1, hlm. 31

Pada ketika itu jumlah anggota PP sebanyak 40 orang dengan tugas pokok menjaga NKRI, mengawal dan mengamankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dari rongrongan PKI beserta orang-orang yang ingin mengambil ideologi Negara RI. Militansi anggota PP Medan sangat menonjol, dan berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Oleh karenanya, dalam masa satu tahun personil anggotanya telah mencapai ribuan orang.

Pertengahan bulan Juli surat kabar mulai beroperasi tapi tidak ada satu pun percetakan yang mau menerbitkan karena ancaman yang dilakukan Pemuda Rakyat. Percetakan Mestika yang dimiliki Tengku Yafizhan, SH. Mengambil keputusan untuk membantu melakukan percetakan tersebut, mendengar ada yang membantu Pemuda Pancasila malam harinya anggota Pemuda Rakyat mendatangi percetakan untuk merusak dan membutuskan kabel listrik. Perlawanan terus dilakukan Pemuda Pancasila, percetakan selanjutnya Harian Tjahaja pindah ke percetakan Deli milik Drs. Amir Husin.

Kunjungan Jenderal Ahmad Yani di Medan untuk menyerahkan bantuan rumah dan masjid kepada keluarga Letda Soedjono, anggota-anggota Pemuda Pancasila yang berkesempatan hadir dan Ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara M.Y.Effendi Nasution turut hadir. Jenderal A. Yani membisikkan Effendi mengenai kondisi politik nasional dan desas desus PKI akan melakukan pemberontakan. Setelah pertemuan ini Effendi mengumpulkan anggota-anggota Pemuda Pancasila untuk mendiskusikan rencana ke depan, Pemuda Pancasila harus siap dan cepat tanggap pada perkembangan situasi terutama pergerakan yang dilakukan PKI dan Pemuda Rakyat di wilayah Sumatera Utara.

Malam 2 Oktober 1965 RRI menyiarkan berita tentang terbunuhnya Jenderal-Jenderal di Jakarta, Pemuda Pancasila cepat tanggap dan langsung berkumpul di bioskop malam itu. Tanpa pikir panjang Pemuda Pancasila tau bahwa dalang tersebut adalah perbuatan PKI, tanpa konsultasi dengan pihak manapun Pemuda Pancasila menyerang kantor dan rumah-rumah anggota PKI.

Pada saat rencana kudeta yang dilakukan PKI dan basisnya tahun 1965, OKP Pemuda Pancasila menjadi salah satu aktor penting dalam penumpasan paham komunis dan para penghianat bangsa tersebut. Di Sumatera para Kader Organisasi Pemuda Pancasila dengan upaya semangat menjaga ideology Pancasila, memberantas paham-paham komunis, partisipan PKI dan basisnya, dan orang-orang beragama Thinghoa. Memiliki motto “SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA TERPANTANG” artinya kalau sudah dimulai maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi, dan memiliki yel-yel “PANCASILA ABADI”. Menjadikan semangat yang membara dalam penumpasan paham komunis dan partisipan komunis bagi kader Organisasi Pemuda Pancasila.

Setelah peristiwa G-30 S-PKI Organisasi Pemuda Pancasila mengadakan Musyawarah Besar (MUBES) untuk pertama kalinya dan M.Y.Effendi menjadi ketua umum Pemuda Pancasila. Pada masa ini IPKI memberi kewenangan penuh kepada Pemuda Pancasila untuk menjalankan roda Organisasi secara mandiri. Setelah penumpasan paham komunis dan partisipannya di Sumatera Utara sendiri Organisasi Pemuda Pancasila cepat berkembang dan sangat disegani oleh masyarakat, dalam waktu singkat jumlah kader Pemuda Pancasila meningkat secara pesat, dan menjadi organisasi masyarakat terbesar di Sumatera Utara.

Ketua Pemuda Pancasila Das Tagor tahun 1967 dan menyerahkan jabatannya kepada A.S. Siregar periode 1972-1974. Pada pertengahan masa jabatan Siregar mengalami masalah pribadi yang mengharuskan untuk tidak lagi berdomisili di Sumatera Utara dan Effendi Nasution mengambil alih sisa masa jabatan A.S Siregar.

4.3 Transformasi Organisasi Pemuda Pancasila

4.3.1 Program dan Perencanaan

Effendi tidak menuntaskan periode jabatannya dan mengundurkan diri pada tahun 1977 lalu digantikan oleh Amran Y.S. Situasi politik di Sumatera

Utara pada Pemilu 1977 berbeda dari daerah lainnya karena Laksus Kopkamtibda memberlakukan aturan Pencabutan Surat Izin Cetak untuk pers di daerah ini. Bagi kepengurusan tahun 1977, pemberlakuan aturan tersebut mempunyai dampak terhadap terhentinya aktivitas kepengurusan Organisasi. Oleh sebab itu, ketika aturan tersebut dicabut usai pemilu, Ketua DPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara menyusun strategi dengan program dan konsep perencanaan yang jelas agar setiap kegiatan tersebut mendapatkan perhatian masyarakat dan pemerintah. Untuk menjalankan roda organisasi saat itu harus ada nya perencanaan dan program yang jelas. Tahun 1977 di ketuai Amran Y.S tercipta lah program dan perencanaan yang matang, yaitu⁴⁶:

Pertama, mengasah kepekaan anggota untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang terjadi. Berdiskusi dengan semua pihak berkepentingan untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat Sumatera Utara.

Kedua, memilih momentum yang tepat untuk mengeluarkan pendapat yang dapat di mengerti dan diterima oleh semua orang.

Ketiga, berusaha sedapat mungkin mendekati orang-orang pers (wartawan) seperti diundang ke kantor atau berdiskusi dan memperhatikan kesejahteraan para pekerja media.

Keempat, bergaul dengan baik dengan penguasa di daerah. Mengadakan audiensi atau dengar pendapat sambil membina hubungan agar urusan lebih mudah dibantu. Pendekatan ini tidak lantas mengikuti apa yang diinginkan para penguasa, jika salah dalam urusan dalam masyarakat harus diingatkan.

Kelima, berani mengatakan benar dan berani mengatakan salah walaupun pahit. Keberanian harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab dan berani menghadapi lawan, baik dengan bicara maupun otot.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 43

Keenam, paling penting menyuarakan aspirasi rakyat secara benar dan tepat. Aspirasi tersebut termasuk memperhatikan anggota, para senior atau sesepuh organisasi yang mengalami hambatan dalam menjalankan urusannya.

Konsep perencanaan dan program dijalankan ketua Pemuda Pancasila Sumatera Utara Amran Y.S, tapi harus membutuhkan adaptasi lingkungan organisasi karena saat itu kondisi internal Pemuda Pancasila belum stabil sepenuhnya. Termasuk saat menjelang pemilu 1977, perbedaan pendapat dari dalam organisasi kepada partai yang akan didukung.

DPW PP Sumatera Utara mengawalinya dengan mengeluarkan pernyataan dukungan kepada pemerintah dan ucapan selamat kepada PWI Sumatera Utara. Pernyataan itu kemudian yang mengawali aktivitas kepengurusan pada periode Amran YS. Sejak itu kegiatan-kegiatan dan sikap Pemuda Pancasila, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat cabang, muncul lebih sering di media cetak lokal. Hubungan mereka dengan pers tampak lebih intim sehingga kegiatan sekecil apapun di daerah misalnya, mulai kelihatan dalam pemberitaan media lokal. Popularitas Pemuda Pancasila secara perlahan-lahan mendapatkan tempat di masyarakat karena batuan para wartawan dan media. Mereka ikut menanggapi dan malahan turun langsung menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat.

Pemuda Pancasila Sumatera Utara turun tangan mempermasalahkan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Salah satu peristiwa penting atas sikap koreksi Pemuda Pancasila terhadap pemerintah yaitu Pemuda Pancasila berdelegasi ke gedung DPRD Deli Serdang terkait dengan isu korupsi yang melibatkan Bupati Deli Serdang.⁴⁷

Keberhasilan Arman YS menjadikan Pemuda Pancasila lebih terorganisir, mendapatkan perhatian pemerintah daerah dan lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Pada Muswil ke VI di Kisaran Amran YS kembali lagi menjadi Ketua DPW periode 1978-1982, keputusan Muswil ke VI tidak luput dari keberhasilan Amran dalam membangun PP Sumatera Utara

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 44

Mengawali periode jabatan baru Amran YS mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan antara lain catur, tinju, sepak bola dan bola voli. Hal ini patut dicatat karena terbukti cukup banyak anggota Pemuda Pancasila yang aktif baik sebagai atlet maupun *official* bidang olahraga di daerah ini. Sebagai salah satu bukti keterlibatan Pemuda Pancasila dalam bidang olahraga ini adalah bahwa Sekretariat PERCASI-SU (Persatuan Catur Seluruh Indonesia-Sumatera Utara) berada di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara.

Masa kemimpinan Amran YS Organisasi Pemuda Pancasila mengalami peningkatan sangat pesat terutama jumlah kader yang terus bertambah. Di kepengurusan masa Amran YS terus melakukan perlindungan kepada Pemuda-pemuda, hingga pada kepengurusan ini dikenal dengan “rumah sakit, penjara, kantor polisi, kodim”, hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dan atas desakan kondisi DPP Pemuda Pancasila membekukannya meskipun seluruh pimpinan DPC masih menginginkan Amran menjadi Ketua DPW PP Sumut.

Musyawarah Wilayah ke VIII Dewan Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara kembali digelar tahun 1984. Muswil kali ini memilih Marzuki sebagai ketua dan Ir. Usran Majid sebagai sekretaris untuk periode 1984-1989. Secara umum kegiatan organisasi Pemuda Pancasila pasca Muswil berjalan menurut kebijakan yang telah digariskan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

Pokok utama dalam kepengurusan periode ini fokus membenah dan menyempurnakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemuda Pancasila Sumatera Utara, pada Musyawarah Besar V tahun 1990 di Jakarta perbaikan AD/ART diterima dengan baik. Fokus dalam membanahi kualitas Pemuda dan perkembangan program-program Organisasi, pokok-pokok program tersebut ialah⁴⁸:

⁴⁸ Nina Karina, *Dinamika*....., hlm. 66

1. Bidang Agama

- a. Meningkatkan kesadaran beragama, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai agama bagi setiap anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara.
- c. Meningkatkan kepedulian anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara terhadap hari-hati besar beragama.
- d. Berperan dalam meningkatkan pembangunan peribadatan serta lembaga pendidikan keagamaan lainnya.

2. Bidang Sosial Politik

- a. Meningkatkan kesadaran politik anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara sebagai generasi penerus yang ikut bertanggungjawab dalam pembangunan demi terwujudnya cita-cita perjuangan bangsa.
- b. Meningkatkan peran serta anggota Pemuda Pancasila dalam setiap masalah politik nasional yang dinamis.
- c. Meningkatkan kesadaran dan penghayatan Pemuda Pancasila akan arti wawasan Nusantara.

3. Bidang Sosial Ekonomi

- a. Turut aktif dalam mengembangkan alternative pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi yang berkeadilan sosial
- b. Aktif dalam menyelesaikan permasalahan penduduk dan urbanisasi dikalangan Pemuda.
- c. Menjalankan pendidikan kewirausahaan, keterampilan, dan koperasi dalam menciptakan kader Pemuda Pancasila yang siap menghadapi kesempatan dan peluang kerja.

- d. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Pemuda terutama anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara akan keterbatasan energi dan sumber daya alam.
 - e. Turut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat umum, terutama masyarakat daerah pedesaan, masyarakat daerah pantai, dan masyarakat daerah kumuh dalam menuntaskan kemiskinan.
 - f. Menjalin kerjasama dalam mengembangkan potensi dan sumber daya manusia terutama anggota Pemuda Pancasila Sumatera Utara.
4. Bidang Sosial Budaya dan Olahraga
 - a. Membina dan memelihara kebudayaan daerah.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kebudayaan daerah.
 5. Bidang Peranan Wanita
 - a. Meningkatkan wibawa dan kepribadian wanita Indonesia terutama Sumatera Utara, dapat menjalankan fungsi ganda sebagai pribadi, istri, dan ibu rumah tangga yang baik sebagai anggota masyarakat dan wanita karir yang berguna.
 - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong terciptanya kader-kader wanita terutama Srikandi Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang memiliki kepribadian Nasionalisme.

Program-program di atas belum sepenuhnya 100% dijalankan, Organisasi Pemuda Pancasila masih memiliki karakter insidental, spontan. Akan mendahulukan program atau kegiatan yang mendesak terlebih dahulu dari pada mengikuti rancangan program yang sudah ditetapkan. Namun, program-program tersebut dilanjutkan oleh pengurus selanjutnya.

Di kepengurusan masa Amran YS melakukan perlindungan kepada Pemuda-pemuda, hingga pada kepengurusan ini dikenal dengan “rumah sakit, penjara, kantor polisi, kodim”, berbeda dengan pemimpin Marzuki lebih mengutamakan penertiban administrasi dan organisasi menjunjung tinggi AD/ART serta menindak tegas anggota yang melakukan penyimpangan.

Kepengurusan DPW PP Sumatera Utara yang mencolok di setiap pertemuan Mubes dengan pusat menjadi pelopor untuk perkembangan Pemuda Pancasila di Indonesia. Pada Mubes VI tahun 1994 di Jakarta, Pemuda Pancasila Sumatera Utara menunjukkan diri kembali dengan mengajukan tawaran bahwa Pemuda Pancasila harus memiliki Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NPD).

Musyawarah Wilayah (Muswil) IX berlangsung sejak 5-7 Desember 1996 di Wisma Haji Pangkalan Mansyur Medan. Sebelum Muswil dilaksanakan Pemuda Pancasila Sumatera Utara mempersiapkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut⁴⁹:

1. Sukses tidaknya hasil Muswil IX Pemuda Pancasila Sumatera Utara melalui Musyawarah ini mengusulkan agar memilih pemimpin yang sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi dan perjuangan bangsa, mempunyai idealisme serta dapat menjadi panutan, bertanggungjawab dan konsisten terhadap perjuangan organisasi Pemuda Pancasila. Pengurus pada setiap jenjang struktur organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara harus mengutamakan mereka yang merupakan putra pejuang.
2. Pemuda Pancasila sebagai salah satu Organisasi terdepan yang menumpas komunis beserta antek-anteknya senantiasa tetap waspada terhadap bahaya komunis yang sewaktu-waktu dapat muncul menjadi gerakan menodai ideology Pancasila.
3. Memperkuat arus globalisasi sebagai perkembangan pengetahuan dan teknologi, transportasi, dan komunikasi.

⁴⁹ Nina Karina, hlm. 55

4. Pemuda Pancasila Sumatera Utara mengusulkan agar koperasi tetap menjadi soko guru dalam perekonomian Indonesia. Pelaksanaan koperasi tidak hanya berlangsung di lingkungan kota akan tetapi juga dilingkungan pedesaan. Untuk itu pemerintah dengan instrument yang ada harus dapat mengendalikan semangat koperasi dilingkungan para konglomerat.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga keseimbangan pembangunan desa pesisir dan desa pegunungan dengan wilayah perkotaan agar mewujudkan kondisi saling menguntungkan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya daerah Sumatera Utara.
6. Pemuda Pancasila memiliki komitmen dan mendukung pemerintah dalam mengentas kemiskinan melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT), Gerakan Pembangunan Marsipature Huta Na Be (MHB).
7. Mengusulkan agar dibentuk dan diterapkan peraturan perundang-undangan untuk masyarakat yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Mendukung sepenuhnya setiap kebijakan pemerintah dalam rangka mengembangkan nasionalisme dan patriotism bangsa Indonesia melalui sosialisasi wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara.
8. Pemilihan umum dilakanakan 29 Mei 1997 Pemuda Pancasila Sumatera Utara konsisten menyalurkan aspirasi politik kepada Golongan Karya (GOLKAR) dan harus aktif memenangkan Golkar dalam pemilihan umum 1997 dan turut mensukseskan sidang umum MPR 1997.

Sebelum Muswil IX, kepemimpinan Pemuda Pancasila memakai sebutan Ketua Umum Wilayah Pemuda Pancasila, setelah itu berganti dengan sebutan Ketua Presidium. Presidium mengangkat Ketua Badan Pelaksana Harian dalam menjalankan roda-roda organisasi yang akan bertanggung jawab kepada Presidium. Perubahan struktur organisasi dilakukan agar Presidium bertindak dalam ranah kebijakan untuk menegaskan arti pentingnya kehadiran Pemuda Pancasila di lingkungan masyarakat. Sementara Ketua Harian bertugas

melaksanakan program dari kebijakan Ketua Presidium dengan kegiatan-kegiatan nyata di lingkungan masyarakat. Sementara Ketua Harian bertugas melaksanakan program dari kebijakan Ketua Presidium dengan kegiatan-kegiatan nyata di lapangan.

Terpilih sebagai Ketua Dewan Presidium DPW Sumut Periode 1996–2001 H. Ajib Shah, SK No. 001/Formatur/Muswil-Sumut-XII-1996, Ketua DPW adalah Drs. Sakhyan Asmara.

Ketua Dewan Presidium DPW Sumut tidak menuntaskan masa jabatannya hingga akhir, Ajib Shah melakukan pengunduran diri dikarenakan fokus pada perkembangan usaha di Jakarta dan sebagai politisi di Partai Golkar⁵⁰. Musyawarah Luar Biasa (Mubeslub) langsung diselenggarakan dan terpilih Donald Sidabalok tahun 1997.

Donald pernah mencalonkan diri menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kota Medan tahun 1997 namun kalah. Bergabung dengan Pemuda Pancasila dimulai pada tahun 1982, pernah menjadi Ketua Ranting Pemuda Pancasila Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Profesi Donald sehari-harinya adalah wartawan. Sebagai jurnalis, tentu banyak hal yang bisa dikerjakan oleh Donald terutama untuk memberitakan peristiwa yang harus diberitakan di media lokal atau justru menghindarinya dari pemberitaan. Di samping itu, Donald juga tidak tertarik untuk berprofesi sebagai politisi meskipun Golkar dan Partai Patriot Pancasila pada waktu itu menawarinya untuk menjadi calon anggota legislatif.

Muswil X berlangsung pada 26-27 Juni 2002 di Sibolga, Donald kembali jadi Ketua DPW Sumut. Terpilihnya Donald periode 2002-2007 disebabkan kinerjanya yang baik di periode sebelumnya, masa-masa sulit dan kondisi politik yang tidak menentu terutama mendampingi anggota-anggota yang mengalami kesulitan secara ekonomi dan hukum.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 59

Muswil XI tanggal 22-24 Juni 2007 dihadiri Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Yapto S. Soerjosoemarno. Pemilihan Ketua DPW PP Sumut menghadirkan dua calon yaitu Donald Sidabalok dan Anuar Shah, hasil Muswil XI memutuskan Anuar Shah terpilih menjadi Ketua MPW PP Sumut periode 2007-2012. Dikabarkan akan terjadi kerusuhan selama musyawarah berjalan maka di hadirkan aparat kepolisian dan TNI yang menggunakan Seragam Satuan Tugas (SATGAS), nyatanya tidak ada kerusuhan besar yang terjadi. Banyak Pimpinan Daerah menginginkan Donald kembali melanjutkan kepengurusan di Sumatera Utara, Anuar Shah yang memiliki dukungan Ketua MPN PP Yapto dan atas dukungannya sebagian besar Pimpinan Cabang PP juga mendukung Anuar Shah.

Muswil XII dilaksanakan kembali pada Februari 2012, Ketua MPW PP Sumut Anuar Shah terpilih kembali kedua kalinya untuk periode 2012-2017. Kinerja dalam kepengurusan periode sebelumnya Pimpinan Cabang menilai Anuar Shah layak melanjutkan kepemimpinan Ketua MPW PP Sumut.

Pada tanggal 4-5 Maret 2017 dilaksanakan Muswil XIII Pemuda Pancasila Sumut beralokasi di lapangan Asrama Haji Medan. Dihadiri Ketua MPN Pemuda Pancasila Yapto Soerjosoemarno, Pangdam I/BB Mayjend TNI Pusung, Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, dan Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) se-Sumut. Secara Aklamasi⁵¹ calon MPW PP Sumut Kodrat Shah terpilih menjadi Ketua MPW Sumut periode 2017-2022.

⁵¹ Aklamasi adalah kegiatan pemilihan yang dilakukan dengan mendapatkan dukungan penuh oleh pihak-pihak terkait tanpa melakukan pengambilan suara atau voting.



Gambar 2-1: Muswil XIII PP Sumut tahun 2017⁵²

Muswil XIV Pemuda Pancasila tanggal 4-6 Februari 2022 di Hotel Santika Dyandra. Dihadiri Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah, dan seluruh anggota PP Sumut. Ketua MPW PP Sumut Kodrat Shah kembali mencalonkan diri dan menjadi calon tunggal dalam pemilihan untuk periode 2022-2027. Kodrat Shah mendapatkan dukungan 100% MPC PP Sumut yang membuat terpilihnya kembali menjadi Ketua MPW PP Sumut.

⁵² Metrorakyat, *Muswil XII Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera utara Kodrat Shah Terpilih Secara Aklamasi*, diakses melalui <https://metrorakyat.com/2017/03/muswil-xiii-pemuda-pancasila-provinsi-sumatera-utara-kodratsyah-> pada 18 Juli 2023 pukul 03:25 WIB



Gambar 2-2: Musyawarah Wilayah XIV Pemuda Pancasila Sumatera Utara 2022⁵³.



Gambar 2-3: Wagub Sumut Musa Rajekshah⁵⁴

⁵³ Redaksi Waspada, *Musyawarah XIV Sumut, Japto:Jaga Idealisme*, diakses melalui <http://waspada.co.id/2022/02/muswil-xiv-pp-sumut-japto-jaga-idealisme/> pada 18 Juli 2023 pukul 03:14 WIB

⁵⁴ Sumutprov, *Musa Rajekshah Harap Pemuda Pancasila Beri Sumbangsih Untuk Kemajuan Sumut*, diakses melalui <https://sumutprov.go.id/artikel/musa-rajekshah-harap-pemuda-pancasila-beri-sumbangsih-untuk-kemajuan-sumut> pada 18 Juli 2023pukul 03:20 WIB

4.3.2 Perangkat Organisasi Otonom Pemuda Pancasila

Di bawah ini perangkat-perangkat Organisasi otonom Pemuda Pancasila yang dibentuk sesuai dengan peruntukannya, sebagai berikut:

4.3.2.1 Satuan Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila

Kaum intelektual menjadi perbincangan hangat untuk mengisi keberagaman kader di dalam Pemuda Pancasila, sekitar tahun 1976 muncul ide untuk didirikan Satuan Mahasiswa (SATMA). Saat itu Mahasiswa memiliki peranan penting dalam semua pergerakan Indonesia, kemampuan dan keterampilan mahasiswa mengelola Organisasi tidak diragukan lagi serta pengetahuan pendidikan yang mereka miliki.

Setelah SATMA dibentuk tidak banyak yang mengetahui bagaimana perkembangan sayap Organisasi Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila mulai kelihatan beraktifitas kembali ketika menjelang diselenggarakannya Pemilu 1987. Bukan hanya kebulatan tekad untuk setia mendukung Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menjadi kegiatan utama, juga mulai mencoba merintis perangkulan unsur kampus dan rakyat luas.

Pada 28 Oktober 1988 Pemuda Pancasila melebarkan sayap tidak hanya pada kalangan mahasiswa saja, tetapi juga siswa atau pelajar. Pendekatan kepada unsur kampus terutama dari kalangan mahasiswa dengan membentuk Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP).

Sekitar tahun 1990an sampai 2005 rekrutmen siswa, pelajar dan mahasiswa menjadi topic hangat para pemuda-pemudi. Langkah ini di nilai untuk menjadikan kader-kader Pemuda Pancasila sebagai kelompok yang berkualitas.

4.3.2.2 SRIKANDI Pemuda Pancasila

Problematis yang terjadi kepada perempuan menjadi perhatian utama, isu-isu diskriminatif dan aspirasi perempuan terabaikan. Organisasi Pemuda Pancasila melihat harus ada wadah bagi perempuan untuk menyampaikan dan menghindari intimidasi yang pernah dialami perempuan.

Pada 28 Oktober 2001 Organisasi Pemuda Pancasila mendirikan Srikandi Pemuda Pancasila untuk memberdayakan perempuan, memperkuat peran perempuan, menyelesaikan problem yang sering di dapatkan perempuan. Dasar dibentuknya Srikandi disebabkan kekerasan seksual yang dialami perempuan sangat terang-terangan dan semakin tidak bisa dikontrol, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diskriminatif di tempat kerja, dan intimidasi perempuan dalam menyampaikan aspirasi nya.

4.3.2.3 Lembaga Sosial Politik

Hasil MUBESLUB 1999 menyatakan agar segera membentuk Partai Politik Patriot, pada Musyawarah Besar (MUBES) VII tahun 2002 mengingatkan kembali akan amanah dari hasil MUBESLUB 1999. Awal bulan Juni 2002 di Jakarta dideklarisikan Partai Politik Patriot oleh anggota Pemuda Pancasila, penyaluran aspirasi politik dan hak-hak politik anggota Pemuda Pancasila tetap sesuai ketentuan MUBESLUB 1999.

Lolos verifikasi di 21 Provinsi mengantarkan Partai Patriot Pancasila mengikuti konstestasi pemilihan 2004. Partai Patriot Pancasila berhasil mendapatkan lebih dari 1 juta suara, untuk memperoleh komposisi yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memiliki kekurangan. Hal ini membuat Partai Patriot Pancasila tidak mencapai kursi di DPR. Pemilihan 2009 Partai Patriot Pancasila mengubah logo dan nama menjadi Partai Patriot, pada pemilihan ini tidak mengantarkan Partai Patriot memiliki kursi di DPR.

4.3.2.4 Komando Inti Mahatidana

Komando Inti (Konti) Mahatidana adalah wadah berhimpun, pemberdayaan dan pengembangan potensi anggota kader Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila. Perangkat Organisasi Pemuda Pancasila fokus dalam memberikan pendidikan kepada kader dalam memahami bagaimana berorganisasi dan memahami pedoman AD/ART Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila.

4.3.2.5 Badan Profesi dan Non Profesi

Badan Profesi yakni: (1) Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila, sebagai wadah menerima konsultasi atau pembelaan hukum untuk anggota Pemuda Pancasila dan masyarakat umum. (2) Pengusaha Pemuda Pancasila, (3) Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila, (4) Badan Tani dan Nelayan Pemuda Pancasila, (5) Badan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Badan Non Profesi yakni: (1) Badan Pelaksana Kaderisasi, (2) Badan Penelitian dan Pengembangan, (3) Badan Penataan Kelembagaan dan Keanggotaan, (4) Badan Kerohanian, (5) Badan Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, (6) Badan Pengembangan Seni dan Budaya, (7) Badan lainnya sesuai Kebutuhan.

4.3.2.6 Yayasan

Yayasan sebagai berikut: (1) Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan, (2) yayasan yang bergerak dibidang kesehatan, (3) Yayasan lain sesuai kebutuhan.

4.3.2.7 Koperasi

Koperasi dibentuk untuk menyalurkan sembako kepada masyarakat dengan mudah dengan harga dan kualitas masih terjangkau oleh masyarakat.

4.3.3 Aspirasi Politik Pemuda Pancasila

4.3.3.1 Pemuda Pancasila dan IPKI

Pada tahun 1960 Ketua Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Sumatera Utara Kerani Bukit mengutus seorang pemuda yang bernama Rachmadsyah untuk mendatangi M.Y.Effendi Nasution di Bioskop untuk membentuk Organisasi Pemuda Pancasila di Medan. Pada bulan Agustus 1961 di gedung Selecta jalan Listrik Medan, Ketua IPKI Kerani Bukit mendirikan Organisasi Pemuda Pancasila (Pemuda Patriot) di Sumatera dengan disaksikan oleh H.A.Aziz yang mewakili Gubernur Sumatera Utara dan Mayor Hamid dari Koanda Sumatera Utara⁵⁵.

Kerani Bukit dalam pidatonya mengatakan akan adanya ancaman terhadap keselamatan bangsa dan Negara dari gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pengikutnya. Maka diperlukan pemuda-pemuda di bawa IPKI untuk mengawal dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara dan landasan Konstitusi⁵⁶.

Terbentuknya berdasarkan kewaspadaan IPKI yang khawatir paham komunis mulai tersebar dengan sangat pesat di wilayah Sumatera Utara, organisasi binaan PKI yaitu Pemuda Rakyat mulai semakin melebarkan sayapnya di lingkungan masyarakat. Dasar terbentuknya Organisasi Pemuda Pancasila itu untuk membatasi pergerakan PKI dan pengikutnya agar tidak mengotak-atik ideology bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Seperti yang diungkapkan oleh Wahis anggota millennial Pemuda Pancasila:

“Pemuda Pancasila diciptakan dari awal untuk menumpaskan PKI, di Sumatera Utara pemahaman PKI sudah tersebar meluas kan. Jadi kita Pemuda Pancasila harus menjaga ideology Bangsa yaitu Pancasila, fokus pemuda-pemuda saat itu mempertahankan ideology Bangsa”

Hal ini juga dibenarkan oleh Gunawan anggota yang sudah malang melintang di Organisasi Pemuda Pancasila:

⁵⁵ Nina Kirana, hlm. 38

⁵⁶ *ibid*

“Pemuda Pancasila dibentuk untuk menjaga NKRI, gak ada yang boleh mengganggu ideology Bangsa yang susah payah diperjuangkan. Jadi pemuda-pemuda Sumatera Utara dikumpulkan dalam Organisasi ini untuk mempertahankan ideology Bangsa saat itu”.

Pemuda Pancasila berbasis anak jalanan mulai merekrut pemuda-pemuda di kampung sekitar Kota Medan. Aksi yang dilakukan Pemuda Pancasila menjadi perhatian pemuda-pemuda yang mendukung PKI yaitu Pemuda Rakyat. Memiliki ribuan massa mereka menggelar demonstrasi-demonstrasi, intimidasi, propaganda untuk mereka yang mengagung-agungkan Pancasila.

Pada saat terlahirnya Pemuda Pancasila tidak berdasarkan tujuan politik menduduki jabatan pada lini pemerintahan, berdiri atas dasar kesadaran Abdul Haris Nasution dan teman-teman di militer bahwa terancam nya ideology Bangsa yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Semakin besarnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan paham komunis yang mulai menjamur pada kehidupan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam wawancara peneliti dengan Profesor.Dr. Marihot Manullang

“Pemuda Pancasila dibentuk untuk mengawasi PKI dan antek-anteknya, anggota Pemuda Pancasila suka mengagung-agungkan Pancasila di tempat umum jadi nilai-nilai Pancasila tidak hanya tertanam pada organisasi aja melainkan pada diri setiap anggota. Tidak ada politik-politik, sebelum tragedy 1965 Pemuda Pancasila sibuk membalas perbuatan antek PKI Pemuda Rakyat yang selalu tidak suka kalau ada masyarakat yang pro-Pancasila”.

Berdasarkan penjelasan di atas hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwasannya, tujuan lahirnya atau berdirinya Organisasi Pemuda Pancasila hanya untuk melindungi ideology Bangsa dan memperjuangkan kemerdekaan yang susah payah dilakukan pahlawan Republik Indonesia sampai terbentuknya ideology yang namanya Pancasila.

4.3.3.2 Fusi Partai

Tahun 1973 pemerintahan Presiden Soeharto melakukan fusi partai dan organisasi. Partai-partai yang berorientasi islamis bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai-partai yang nasionalis bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan organisasi pemuda bergabung dengan partai Golongan Karya (Golkar). Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia (IPKI) memutuskan bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Keputusan IPKI bergabung dengan PDI tidak menjadi tolak ukur bagi Pemuda Pancasila mengikuti keputusan IPKI tersebut. IPKI memberikan wewenang penuh kepada Organisasi Pemuda Pancasila untuk memilih kemana mereka akan berafiliasi.

Untuk pertama kalinya Pemuda Pancasila Sumatera Utara mengutarakan sikap politiknya, itu dilakukan saat Musyawarah Wilayah (Muswil) ke III tahun 1974. Memutuskan Pemuda Pancasila bersikap Independen, tidak menunjukkan keberpihakan politik kepada salah satu Partai Politik.

Independensi yang dikatakan ketika itu, lebih bersifat politis ketimbang yuridis. Tidak ada perubahan dalam AD/ART yang sesuai dengan keputusan organisasi pada Muswil tersebut karena adanya tawaran politik yang berasal dari partai politik yang berada di balik kekuatan Pemerintah Orde Baru. Kesan tersebut ternyata disambut nyata ketika munculnya pernyataan peserta musyawarah Pemuda Pancasila mengenai kebulatan tekad satuan-satuan pengurus organisasi di berbagai tempat untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar) pada Pemilu 1977.

Tawaran politik berasal dari partai penguasa saat itu yaitu Golongan Karya (Golkar) sehingga terjadi perselisihan pendapat dalam menyalurkan aspirasi. Pemuda Pancasila memiliki tujuan untuk memenangkan kandidat yang diusung Golkar pada pemilihan legislative dan eksekutif, kader partai Golkar banyak menduduki jabatan di Legislatif karena dalam pemilihan masa itu memiliki dukungan OKP dan pada saat pemilihan Eksekutif selalu dimenangkan kader

Golkar yaitu Soeharto. Transformasi organisasi merupakan perubahan organisasi dari kondisi semula, membentuk karakter organisasi yang berbeda dari sebelumnya⁵⁷.

Musyawarah Besar (Mubes) ke III tahun 1981 Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila memutuskan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan Karya (Golkar)⁵⁸, keputusan ini menegaskan kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila untuk memenangkan dan mendukung Golkar. Dukungan tersebut terjadi cukup lama, Pemuda Pancasila mendukung Golkar hingga tahun 1997. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara peneliti dengan bapak Ujang, beliau mengatakan bahwa:

“Saat itu sekitar tahun 1973 pemerintah mengeluarkan peraturan yang diharuskan adanya fusi partai, IPKI bergabung ke salah satu Partai yaitu PDI, Pemuda Pancasila didirikan oleh IPKI tentu saja pada pemilu pertama 1977 sebagian anggota ada yang ke PDI dan ada yang ke Golkar bahkan PPP karena kita Pemuda Pancasila diberikan ke bebasan secara politik mendukung partai mana pun, terlihat mayoritas masa pak Harto kita ke Golkar tidak lain karena anggota kita mayoritas anggota kita ada di Golkar.

Dukungan politik tersebut tidak hanya dukungan melainkan Pemuda Pancasila Sumatera Utara sering mengomentari kebijakan atau penyelewengan jabatan yang dilakukan DPR yang di anggap merugikan masyarakat. Menjadi sayap partai Golkar sampai pada tahun 1998, setelah runtuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.

4.3.3.3 Independen Organisasi Pemuda Pancasila

Mubeslub tahun 1999 memutuskan dua hal, menyatakan bahwa Organisasi Kepemudaan (OKP) Pemuda Pancasila menjadi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan menyatakan secara terbuka Pemuda Pancasila tidak akan memihak Partai Politik apa pun. Pada saat ini Pemuda Pancasila memberikan kebebasan kepada

⁵⁷ Imelda Liana, Sarida Surya, dan Hedy Tan, 2019, *Menciptakan Transformasi Organisasi Melalui Kepemimpinan dan Organisasi Belajar*, (Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis), Cet.1. hlm. 13

⁵⁸ Nina Karina, *Dinamika* hlm. 7

seluruh anggota memasuki partai dan mendukung partai yang menurut nya terbaik. Anggota PP yang saat itu terlibat pada transisi reformasi menyatakan:

“Setelah reformasi banyak nya Partai Politik dan lebih dominan, tetap kita mendukung anggota Pemuda Pancasila dimana pun Partai nya dan apapun partai nya. Selama anggota dan memiliki visi-misi yang jelas kita berikan dukungan penuh, demi kemajuan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan kemaslahatan masyarakat kita akan dukung.

Riwayat Organisasi Pemuda Pancasila sangat aktif mendukung kepala daerah (eksekutif), Dewan Perwakilan (Legislatif) diberbagai daerah di Indonesia terutama Sumatera Utara. Sebagai organisasi pemuda pertama Indonesia yang militant menjadi incaran para politikus, aktor politik untuk menduduki suatu jabatan. Deklarasi Ormas ini juga menjadi penentu suara yang akan diperoleh seorang calon, jumlah Ormas yang menyebar diberbagai titik.

Dukungan yang aktif dilakukan Organisasi Pemuda Pancasila kepada anggota-anggota atau keluarga Pemuda Pancasila yang terjun ke dalam kontestasi politik baik itu pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislative. Anggota Pemuda Pancasila ada yang maju menggunakan kendaraan Partai-Partai Politik Indonesia atau Daerah dan ada juga yang independen (tidak melalui Partai Politik). Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ujang seorang anggota Organisasi Pemuda Pancasila yang sudah bergabung sejak tahun 1982, mengungkapkan

“Aspirasi politik bisa digunakan kemana saja, mau Partai Politik mana saja boleh asalkan orang tersebut adalah kader Organisasi Pemuda Pancasila. Anggota bebas memilih mau maju lewat Partai Politik atau independen. Kita akan tetap dukung”.

Pernyataan di atas menggambarkan bagaimana solidaritas dan dukungan Organisasi Pemuda Pancasila kepada anggota nya untuk memulai karir dan mendukung kader Pemuda Pancasila untuk kemaslahatan masyarakat luas. Prof.Marihot Manullang menyampaikan dengan tegas:

“Kebebasan memilih melalui partai politik diberikan kepada setiap anggota Pemuda Pancasila untuk maju sebagai calon Legislatif dan kepala daerah. Ada pertimbangan yang harus dilakukan sebelum mendukung calon. Pemuda Pancasila memberikan sikap independen kepada partai politik, dukungan diberikan kepada anggota. Kalau ada 2 anggota Pemuda Pancasila yang maju di satu wilayah yang sama nanti diadakan musyawarah, kita akan dukung anggota terbaik”.

Transformasi yang dilakukan Organisasi Pemuda Pancasila atas dasar kondisi sosial dan politik masyarakat pada masa itu, krisis ekonomi sangat berdampak kepada krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Seperti yang dikatakan pak Ujang seorang anggota dari tahun 1980-an :

“Banyak pertimbangan saat itu, anggota-anggota sudah matang dalam membaca dan melihat kondisi sosial yang mulai tidak stabil. Kehidupan sosial yang tidak stabil bisa tidak baik, apalagi kita krisis ekonomi, kericuhan diberbagai wilayah. Saat itulah kita diberi kebebasan dalam menyatakan sikap politik, anggota bebas memilih partai mana pun. Setelah peristiwa banyak kan partai-partai politik, anggota kita tersebar di beberapa partai saat itu. Artinya kita secara politik Pemuda Pancasila tidak terikat sama satu partai saja, sampai sekarang semua bebas dalam memberikan dukungan politik”.

Menurut Aspara dkk (2012) transformasi organisasi perubahan portofolio organisasi agar Organisasi memiliki kemampuan nilai jual yang lebih dari sebelumnya atau kompetitornya⁵⁹. Perubahan Organisasi yang terjadi sebagai suatu proses yang sedang berlangsung untuk membuat suatu sistem yang baru dan berbeda dari sistem sebelumnya untuk mencapai visi-misi organisasi.

Untuk itu peneliti menyusun secara ringkas dukungan politik yang diberikan Organisasi Pemuda Pancasila di table yang mempermudah untuk dipahami, setelah reformasi partai politik yang semakin banyak lahir untuk memajukan Bangsa dan Negara tapi organisasi masyarakat juga bisa dengan mudah memperjuangkan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap warga nya dapat tersalurkan dengan baik.

⁵⁹ Imelda Liana, 2019, Ibid.

Dibawah ini adalah table rangkuman melalui hasil riset pusaka, wawancara dan jejaring internet, sebagai berikut:

no	Kab/Kota Sumut	Orde Lama	Orde Baru	Reformasi	sekarang	
1	Langkat				2018 (menang)	2013 (menang)
2	Kota Binjai				2020 (kalah)	2015
3	Kota Medan				2020 (Menang)	2015
4	Deli Serdang				2018 (menang)	2013 (menang)
5	Karo				2020 (menang)	2015
6	Dairi				2018 (menang)	2013
7	Pakpak Barat				2020 (Menang)	2015
8	Serdang Bedagai				2020 (Menang)	2015(menang)
9	Kota Tebing Tinggi				2017 (menang)	2011-2012 (menang)
10	Batu Bara				2018 (kalah)	2013 (menang)
11	Simalungun				2020 (Menang)	2015
12	Kota Pematang Siantar				X	X
13	Samosir				2020 (kalah)	2015 (menang)
14	Humbang Hasundutan				X	X
15	Kota Sibolga				2020 (menang)	2015
16	Tapanuli Tengah				2017 (kalah)	2012
17	Tapanuli Timur				X	X
18	Tapanuli Selatan				(menang)	2015
19	Kota Padang Sidempuan				2018 (kalah)	X
20	Mandailing Natal				2020 (menang)	2015 (kalah)

21	Padang Lawas				2018 (menang)	2013 (menang)
22	Padang Lawas Utara				2018 (menang)	2013
23	Labuhan Batu				2020 (kalah)	2015 (menang)
24	Labuhan Batu Selatan				2020 (menang)	2015
25	Labuhan Batu Utara				2020 (menang)	2015 (menang)
26	Toba				2020 (kalah)	2015 (menang)
27	Asahan				2020 (menang)	2015 (menang)
28	Kota Tanjung Balai				2020 (menang)	2015 (menang)
29	Nias				2020 (kalah)	2015
30	Nias Selatan				2020 (menang)	X
31	Nias Barat				2020 (menang)	X
32	Nias Utara				2020 (menang)	X
33	Kota Gunungsitoli				2020 (menang)	X

Table II; Arah Politik Sejak Berdirinya Organisasi Pemuda Pancasila Sampai Sekarang

Keterangan:

1. Warna hitam (tidak ada unsur politik)
2. Kuning (Partai Golkar)
3. Kuning tua (Hanura)
4. Abu-abu tua (independen)
5. Abu-abu muda (tidak ada sikap politik)
6. Merah Muda (PDI-P)
7. Merah tua (Gerindra)
8. Biru tua (Nasdem)
9. Biru muda (Demokrat)
10. Biru langit (PAN)

11. Putih (independen/tanpa partai)
12. X tidak ada keterangan

Table di atas dukungan Pemuda Pancasila pada salah satu calon yang bersaing pada pemilihan daerah yaitu pemilihan Bupati/wakil Bupati atau Walikota/wakil Walikota se-Sumatera Utara. Pada pemilihan Gubernur/wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2018 Pemuda Pancasila mendukung calon pasangan Edy Ramahyadi-Musa Rajekshah, seluruh anggota Pemuda Pancasila di Sumatera Utara diwajibkan mendukung pasangan ini. Tercatat calon wakil Gubernur adalah anggota terbaik Pemuda Pancasila yang juga aktif dalam Organisasi, dukungan yang diberikan mampu memenangkan kontestasi politik tahun 2018.

Organisasi yang terdiri dari kumpulan manusia, tentu mempunyai ciri dan karakteristik sendiri. Organisasi yang telah mapan dengan pengalaman panjang diyakini telah mempunyai budaya Organisasi.⁶⁰

⁶⁰ Sentot Imam Wahjono, 2010, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 7



Gambar 3-1: nomor (1) Bupati Langkat dan Ketua MPW PP Sumut





Gambar 3-2: nomor (2) dukungan MPW PP Sumut kepada calon walikota Binjai



Gambar 3-3: nomor (3) dukungan MPW PP Sumut kepada calon Walikota Medan



Gambar 3-4: nomor (5) Dukungan MPC Karo kepada pasangan Cory-Theoplius Nomor 5

4.3.4 Status dan Anggota Organisasi Pemuda Pancasila

4.3.4.1 Status Pemuda Pancasila

Pada saat sebagai sayap Ikatan Pejuang Kemerdekaan Indonesia (IPKI) Pemuda Pancasila sebagai Organisasi Kepemudaan (OKP) Pemuda Pancasila, retribusi yang dilakukan masa itu fokus kepada pemuda-pemuda yang berkumpul di bioskop dan anak-anak jalanan.

Perekrutan anggota pada tahun 1980-an terfokus kepada mahasiswa-I, mereka di anggap memiliki pengalaman terstruktur dalam mengelola organisasi. Tahun 1990 OKP Pemuda Pancasila menjadi sangat populer dikalangan anak muda, berawal fokus kepada mahasiswa menjadi kepada siswa dan pelajar.

Seiring berjalannya waktu anggota Pemuda Pancasila tidak lagi diduduki anak muda, semua memiliki pengalaman dari berbagai bidang terutama perpolitikan dengan usia yang tidak lagi muda. Mengikuti perkembangan di dalam organisasi dan lingkungan pada MUBESLUB tahun 1999 memutuskan bertransformasi menjadi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS). Keputusan tersebut berlanjut hingga hari ini.

4.3.4.2 Anggota Organisasi Pemuda Pancasila

Setelah dibentuk di Kota Medan jumlah anggota Pemuda Pancasila hanya 40 (empat puluh) anggota, seiring berjalannya waktu setelah peristiwa G30-S PKI anggota Pemuda Pancasila terus meningkat lebih kurang mencapai 3.000.000 (tiga juta) anggota.⁶¹

Tahun 2019 Organisasi Pemuda Pancasila menerima penghargaan dari rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas kategori anggota terbanyak dan Ikrar Anti Narkoba⁶². Jumlah anggota yang dimiliki Organisasi Pemuda Pancasila adalah 9.000.000 juta (Sembilan juta) anggota, ini menjadikan Organisasi Pemuda Pancasila sebagai Organisasi Masyarakat ke 3 terbesar di Indonesia.

Organisasi Masyarakat terbesar di Indonesia adalah: (1) Nahdlatul Ulama (NU) sebanyak 91,2 Juta anggota sebagai Ormas Islam, (2) Muhammadiyah Ormas Islam kedua memiliki 60 juta anggota, (3) Pemuda Pancasila sebanyak 9 juta anggota sebagai Ormas dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan agama.

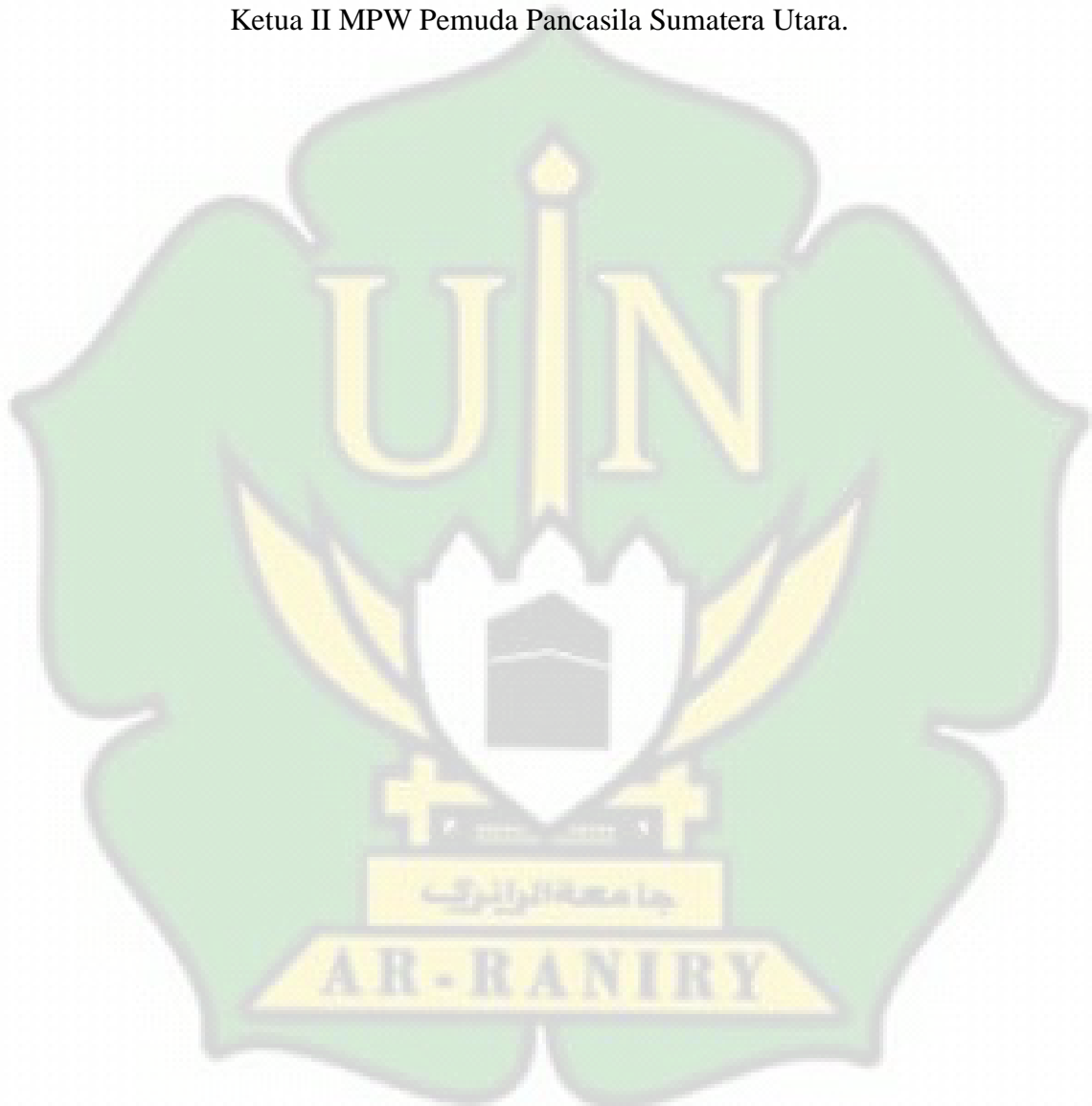
Anggota yang dimiliki Organisasi Pemuda Pancasila dari banyak kalangan pejabat baik pemerintah dan non pemerintah. Kepengurusan Pemuda Pancasila di pegang oleh tokoh-tokoh penting di Indonesia, seperti:

1. Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai Wakil Ketua Umum I (organisasi) Majelis Pimpinan Nasional.
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Mohammad Arsjad Rasjid P.M sebagai Wakil Ketua III (perekonomian dan industry) MPN.

⁶¹ Film Dokumenter Organisasi Pemuda Pancasila berjudul *JAGAL*.

⁶² Ormas Pemuda Pancasila Pecahkan Dua Rekor Muri Dunia. Diakses melalui <https://www.mpr.go.id/berita/ormas-pemuda-pancasila-pecahkan-dua-rekor-muri-dunia> pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 20:58 WIB

3. Mantan Menteri Pertahanan Indonesia 2014-2019 Jenderal TNI (Purn.) Ryamizard Ryacudu sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ormas Pemuda Pancasila Tingkat Nasional.
4. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah sebagai Wakil Ketua II MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Terbentuknya Organisasi memiliki alasan yang kuat, pertimbangan sosial, budaya, ekonomi, politik yang tidak menentu mampu menghadirkan pergerakan sosial. Kondisi pra-kemerdekaan yang tidak stabil membuat anak-anak muda berkumpul untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada golongan mereka. Organisasi yang dibentuk untuk perdagangan, organisasi yang dibentuk untuk mengumpulkan orang-orang satu etnis atau suku supaya tujuan yang mereka inginkan dengan mudah tercapai.

Berdirinya Pemuda Pancasila pada dasarnya untuk kebutuhan sosial-politik, diperuntukan sebagai benteng mempertahankan ideology bangsa dan kesatuan negara dikendalikan oleh IPKI sebagai sayap partai. Sejak tahun 1961 sebagai Organisasi Kepemudaan (OKP) Pemuda Pancasila fokus mengajaja ideology dari paham komunis. Perubahan politik yang terjadi 1965, kekalahan IPKI pada pemilu 1971 dan fusi partai yang diberlakukan masa pemerintahan Soeharto tahun 1973 serta merapatnya IPKI ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI),

IPKI memberikan wewenang kepada Pemuda Pancasila untuk memutuskan sikap apa yang Pemuda Pancasila inginkan. Tahun 1977 Pemuda Pancasila melakukan musyawarah dan menyatakan sikap idependen, artinya tidak mengikuti jejak IPKI atu memberikan sikap sepihak. Pada kenyataan nya mayoritas Pemuda Pancasila memilih masuk ke salah satu partai politik yaitu Golkar dan mendukung partai nya, Realisasi keputusan tidak dilanjutkan dengan serius. Tahun 1981 Pemuda Pancasila memilih secara terbuka mendukung partai Golkar serta menjadi sayap partai berwarna kuning tersebut.

Berawal memiliki 40 anggota, Pemuda Pancasila perlahan berkembang dengan signifikan hingga pada tahun 2019 Pemuda Pancasila memiliki anggota lebih kurang dari 9 juta anggota di seluruh Indonesia dan mendapatkan

penghargaan rekor MURI sebagai Ormas yang memiliki anggota terbanyak di Indonesia.

Memperbaiki cara mengelola Organisasi Pemuda Pancasila mengambil langkah untuk merekrut kaum intelektual, dengan membentuk SAPMA. Memperhatikan kondisi kekerasan seksual yang dialami perempuan, meningkatnya kekerasan fisik, perempuan dianggap sebagai golongan yang lemah. Organisasi Pemuda Pancasila mengambil langkah yang berani untuk fokus terhadap isu-isu mengenai perempuan dengan membentuk Srikandi Pemuda Pancasila.

Tahun 1999 Pemuda Pancasila melakukan Musyawarah Luar Biasa (Mubeslub) memutuskan untuk bertransformasi menjadi Organisasi Masyarakat, saat itu Pemuda Pancasila tidak hanya diisi oleh Pemuda-pemuda melainkan diisi dari berbagai usia, pendidikan, status sosial, budaya yang berbeda-beda. Dan Mubeslub juga memutuskan sikap politik Pemuda Pancasila untuk independen serta memberikan kebebasan kepada seluruh anggota memilih partai politik yang berbeda-beda.

Pasca reformasi hingga sekarang Pemuda Pancasila tetap menjalankan keputusan Mubeslub 1999, anggota bebas masuk ke partai yang dianggap bisa menjadikannya kendaraan politik. Calon Legislatif atau calon Kepala Daerah yang meminta bantuan seperti dukungan akan dibantu oleh Organisasi Pemuda Pancasila dengan persyaratannya bahwa calon tersebut adalah anggota Pemuda Pancasila.

Tokoh Pemuda Pancasila ada diberbagai profesi, di luar dan dalam pemerintahan. Seperti Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin merupakan anggota Kehormatan Pemuda Pancasila, Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai Wakil Ketua Umum I, Menteri Pemuda dan Olahraga Zaenyddin sebagai Wakil ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), kepala-kepala Daerah, legislative, pengajar atau dosen, mahasiswa atau pelajar dan lain sebagainya.

Kondisi sosial-politik Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, namun Organisasi Pemuda Pancasila dapat menyeimbangi hal tersebut menunjukkan apa yang dilakukan kepengurusan yang sebelumnya memiliki pondasi yang kuat. Program-program yang diterapkan anggota cepat tanggap dan mampu membaca situasi, dan ketegasan Organisasi Pemuda Pancasila mengambil sikap dalam situasi yang dihadapin.

Dukungan yang diberikan mulai dari Pimpinan Anak Cabang (PAC), Majelis Pimpinan Cabang (MPC), Majelis Pimpinan Wilayah (MPW), dan Majelis Pimpinan Nasional (MPN) kepada anggota yang memiliki tujuan melakukan perubahan lebih baik, menurunkan angka kemiskinan, mensejahterakan masyarakat, dan mementingkan keadilan sosial.

5.2 Saran

Berdasarkan apa yang dirumuskan pada skripsi disarankan perlu nya pengkajian lebih dalam mengenai sejarah Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, skripsi ini di tulis dari beberapa kajian pustaka dan narasumber yang terlibat atau mengetahui kondisi masa itu. Kepada anggota Organisasi Pemuda Pancasila lebih fokus atas tujuan terbentuknya Organisasi, mengembangkan Organisasi, menjalankan program-program yang sudah tersusun dengan baik, menjaga nama baik Organisasi Pemuda Pancasila dengan memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar dan mengurangi stigma-stigma negative yang sering diberikan masyarakat dengan membuat kegiatan-kegiatan yang menguntungkan masyarakat luas.

Sebagai generasi penerus yang menjalankan roda kepengurusan Organisasi harus lebih mengembangkan, mempertahankan nilai-nilai yang sudah di perbaiki pengurus sebelum-sebelumnya. Dengan memperlihatkan perkembangan yang lebih baik Pemuda Pancasila Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Widjajanto, dkk. *Transnasional Masyarakat Sipil*. Yogyakarta. LKIS. cet, 1. 2006.
- Candra Wijaya. *Prilaku Organisasi*. Medan. Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia. 2017.
- Deliar Noer. *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Bandung. PT.Mirzan. 2000.
- Hafied Cangara. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada. 2009.
- Haris Hardiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Salemba. 2012.
- Husaini, Purnoma Setiady. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara. 2009.
- Januari dan Salahuddin. *Negara Versus Masyarakat Sipil Arus Lokal*. Yogyakarta. Jurusan Ilmu Pemerintahan UMM. cet,1. 2014.
- Khoirul Muslimin. *Buku Ajar Komunikasi Politik*. Jepara. Perpustakaan Nasional KDT. ed. 1-cet.2. 2020.
- Koentjaraningrat. *Masalah Kesukubangsaan dan Integral Nasional*. Jakarta. Universitas Indonesia. 1993.
- Kriyantono Rahmad. *Teknik Praktis Ris*. Jakarta. PT. Kencana Perdana. 2006.
- Meriam Budiharjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Muhammad Rifa'I, Muhammad Fadhli. *Manajemen Organisasi*. Bandung. Ciptapustaka Media Printis. 2013.
- Muhammad Qaddaruddin. *Kepemimpin Politik Prespektif Komunikasi*. Yogyakarta. Deepublish. 2016.

Muryanto Amin. *Politik Layar Terkembang*. Medan. Vote Institute. 2013.

Ronny Melelak. *Apa dan Bagaimana Indeks Masyarakat Sipil*. Jakarta. Yapikka. 2014.

Sentot Imam Wahjono. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2010.

Siswanto dan Sucipto Agus. *Teori dan Prilaku Organisasi*. Malang. UIN Malang Press. Cet,1. 2008.

Wardiah Lasmi Mia. *Teori Prilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung. CV Pustaka Setia. cet.1. 2016.

Skripsi/Tesis:

Nina Karina. *Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara*. Medan. USU e-Repository. 2008.

Wendra Yunaldi, dkk. *Efektivitas Masyarakat Sipil di Kenagarian Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Demokratisas. Integritas. AntiKorupsi 7(1)*.

Jurnal:

Fahdian Rahmandani dan Samsuri. *Hak dan Kewajiban Dasar Nilai Interinsik Warga Negara Dalam Membentuk Masyarakat Sipil*. Jurnal Kajian Agama, Sosial, Budaya. Vol,4. Nomor, 1. 2019.

Hieronymus Purwanta. *Evaluasi Buku Teks Pelajaran Sejarah Pada Masa Orde Baru*. Cakrawala Pendidikan. Nomor 3 November 2012.

Mohammad Maiwan. *Kelompok Kepentingan, Kekuasaan, Kedudukan Dalam Sistem Politik*. Jurnal Ilmiah Demokrasi. Volume,15. Nomor,2. 2016.

Internet/Surat Kabar:

Metrorakyat. *Muswil XII Pemuda Pancasila Proinsi Sumatera Utara Kodrat Shah Terpilih Secara Aklamasi*. Diakses pada 18 Juli 2023 03:25 WIB. <https://metrorakyat.com/2017/03/muswil-xii-pemuda-pancasila-provinsi-sumatera-utara-kodratsyah->

Sumut24. *Mengulas Sejarah Pemuda Pancasila, HMY EFENDY Nasution Ketua DPW PP Sumut Pertama*. Medan. Diakses pada Rabu 30 Desember 2020

Medanbisnisdaily. *Pemuda Pancasila se-Sumut Siap Memenangkan Eramas*. Diakses pada Kamis 31 Desember 2019 <https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/02/27/338850/pemuda-pancasila-se-sumut-siap-menangkan-eramas/>

Waspada. *Musyawarah XIV Sumut, Japto:Jaga Idealisme*. Diakses Pada 18 Juli 2023 03:24 WIB. <https://waspada.co.id/2022/muswil-xiv-pp-sumut-japto-jaga-idealisme/>

Sumutprov. *Musa Rajekshah Harap Pemuda Pancasila Beri Sumbangsih Untuk Kemajuan Sumut*. Diakses pada 18 Juli 2023 03:20 WIB. <https://sumutprov.go.id/artikel/musa-rajekshah-harap-pemuda-pancasila-beri-sumbangsih-untuk-kemajuan-sumut>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tentang Kepala Daerah dan pemilihan Umum*, diakses pada 2 Januari 2021

Badan Pelaksanaan Kaderisasi Pemuda Pancasila, *Sejarah Pemuda Pancasila*, (DKI Jakarta: Rumah Kerja Pengurus Nasional BPK). Diakses Pada 30 Desember 2020 Dari Situs <http://www.bpk-pp.com/sejarah-pemuda-pancasila>

Dokumentasi

1. Wawancara Prof. Dr. Marihot Manullang, Ketua Dewan Pakat MPW PP Sumut.





2. Wawancara Pak Ujang Anggota Pemuda Pancasila Sejak Tahun 1980an



3. Wawancara Pak Gunawan Anggota Pemuda Pancasila Sumut Sejak 1980an






Razmi Sartika Jamil

Lulusan Ilmu Politik

 razmisartikaj@gmail.com

 085668315794

Data Pribadi

- Nama : Razmi Sartika Jamil
- Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 23 Mei 1999
- Alamat : Komplek Perumahan Darussalam Village
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kewarga Negara : Indonesia
- Status : Belum Menikah




Pendidikan

- TK Hidatus Shibyan Manunggal Deli Serdang
- SDN 106805 Deli Serdang
- SMP Swasta Galih Agung Deli Serdang
- MA Swasta Lab UIN SU Medan
- UIN Ar-Raniry

Pengalaman

- Magang di LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).
- Karyawan di Toko Butik

Keahlian

- Microsoft Word 
- Microsoft Excel 
- Power Point 

Penguasaan Bahasa

- Bahasa Indonesia (Aktif)
- Bahasa Arab (Pasif)

Pengalaman Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kom. FISIP UIN Ar-Raniry
- Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL)